

**SKRIPSI**

**DINAMIKA PENGELOLAAN SAMPAH POLA KEMITRAAN  
DI TANGGUL PANTAI CEMPAE**



**OLEH**

**ERINA PUTRI PURNAMA AMIR  
NIM: 2020203869201007**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026 M / 1448 H**

**DINAMIKA PENGELOLAAN SAMPAH POLA KEMITRAAN  
DI TANGGUL PANTAI CEMPAE**



**OLEH**

**ERINA PUTRI PURNAMA AMIR  
NIM.2020203869201007**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2026 M / 1448 H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan Di  
Tanggul Pantai Cempae.

Nama Mahasiswa : Erina Putri Purnama Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203869201007

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah

Nomor : B-1785/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abd. Wahidin, M.Si

NIP : 19780128202321 1005

Pembimbing Pendamping : Abd. Rasyid, M. Si

NIP : 19880712 202321 1 024

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Wahidin, Lc., M.Fil.I  
NIP. 19780128202321 1005

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan  
Di Tanggul Pantai Cempae.

Nama Mahasiswa : Erina Putri Purnama Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203869201007

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
B-1785/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2003

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abd. Wahidin, M.Si

(Ketua)

Abd. Rasyid, M. Si

(Sekretaris)

Prof. Dr. Hj. St. Aminah Azis, M.Pd.

(Anggota)

Dr. M. Ihsann Darwis, M.Si.

(Anggota)

Mengetahui:



Dr. H. Abdulhadi, Lc., M.Fil.I.

NIP. 060713 200912 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan hidayah, rahmat, taufik, dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di hari akhir.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم beserta keluarga-keluarganya, para sahabat, dan yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman kelak.

Dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda (Iddayani) dan Ayahanda (Amiruddin, S.E.). Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan ayah dan ibu dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Abd. Wahidin, M.Si. dan Abd. Rasyid, M. Si. selaku pembimbing. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Hj.Darmawati,S.Ag,M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.

2. Bapak Dr. H.Muhiddin,Lc.,M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushudullid Adab dan Dakwah serta Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum selaku Wakil Dekan atas pengabdianannya menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. St.Aminah, M.Pd. dan Bapak Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si selaku penguji penulis yang telah meluangkan waktu, koreksi, dan kritik membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Hj. Nurmi, M.A. Kabag TU dan seluruh staff administrasi akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu penulis dalam tahap administrasi selama belajar di IAIN Parepare.
6. Kepada seluruh dosen Prodi Sosiologi Agama maupun dosen yang pernah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan, Staf Fakultas FUAD atas pelayanan administrasi yang sangat membantu penulis, dan kepada seluruh Staf Perpustakaan IAIN Parepare yang memudahkan penulis mencari referensi bacaan selama mengerjakan skripsi.
7. Bapak Amiruddin dan Ibu Iddayani selaku orang tua penulis yang memberikan banyak dukungan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Arhamdi S,Si. M,Si Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup yang telah membantu penulis melakukan penelitian di DLH.
9. Kepada Bapak dan Ibu staf kelurahan Lakessi yang telah meluangkan waktu membantu penulis dalam melakukan penelitian di wilayah tersebut.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Eka Sri Wahyuni S.Sos., Nasrah Nur Auliah. S.pd. dan M. Ikham. S.Sos. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kebersamaan, keceriaan, dukungan, serta kasih sayang yang senantiasa kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis, memberikan warna dan kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga kita senantiasa melangkah menuju kesuksesan, saling menguatkan, dan tetap bersama dalam setiap perjalanan yang kita tempuh ke depan.

11. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah bertahan melalui setiap proses, jatuh bangun, keraguan, dan kelelahan selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah meski ada hari-hari sulit, tetap percaya meski sering merasa ragu, dan tetap berusaha meski hampir menyerah. Penulis mengapresiasi setiap usaha, ketabahan, dan keberanian yang telah dilakukan hingga akhirnya dapat tiba pada tahap ini. Semoga diri ini terus menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh semangat dalam menghadapi perjalanan hidup ke depan.

Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan dan kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala untuk kita semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Juli 2026  
Penulis,



Erina Putri Purnama Amir  
NIM 2020203869201007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erina Putri Purnama AMIR  
NIM : 2020203869201007  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 25 Juli 2002  
Program Studi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan dakwah  
Judul Skripsi : Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan Di  
Tanggul Pantai Cempae

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2026  
Penyusun,



Erina Putri Purnama Amir  
NIM 2020203869201007

## ABSTRAK

Erina Putri Purnama Amir, *Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan Di Tanggul Pantai Cempae* (dibimbing oleh Abd. Wahidin dan Abd. Rasyid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare serta menganalisis faktor pendukung dan kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Cempae, pengelola TPS3R, pelaku UMKM, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui kemitraan antara DLH, Kelurahan, TPS3R, masyarakat, RT/RW, komunitas lingkungan, UMKM, dan sektor swasta. Bentuk kemitraan meliputi kegiatan bersih pantai, sosialisasi, pengangkutan dan pemilahan sampah, serta penguatan kelembagaan TPS3R. Kemitraan ini memberikan dampak positif terhadap kebersihan kawasan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai peran masing-masing pihak, serta belum optimalnya operasional TPS3R. Keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi fungsi TPS3R, dan kolaborasi yang berkelanjutan antaraktor.

**Kata kunci:** Dinamika Pengelolaan Sampah, Pola Kemitraan, Partisipasi Masyarakat, TPS3R, Tanggul Pantai Cempae.

## DAFTAR ISI

|                                             | Halaman |
|---------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                          | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ..... | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....     | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                        | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....            | vii     |
| ABSTRAK .....                               | viii    |
| DAFTAR ISI.....                             | ix      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                       | xi      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                 | xii     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                      | 1       |
| A. Latar Belakang.....                      | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 12      |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 12      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                | 13      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....         | 13      |
| B. Landasan Teori .....                     | 15      |
| C. Kerangka Konseptual .....                | 24      |
| D. Kerangka Pikir.....                      | 33      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....              | 36      |
| A. Jenis Penelitian .....                   | 36      |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....         | 37      |
| C. Fokus Penelitian .....                   | 37      |
| D. Jenis dan Sumber Data .....              | 37      |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....            | 39      |
| F. Teknik analisis Data.....                | 42      |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                            | 47  |
| A. Hasil Penelitian.....                                                                                                | 47  |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian.....                                                                                     | 76  |
| 1. Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah di Tanggul Pantai<br>Cempae Kota Parepare .....                     | 77  |
| 2. Analisis Hasil atau Dampak Pengelolaan Sampah Melalui Pola<br>Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare ..... | 86  |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                      | 91  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                      | 91  |
| B. Saran .....                                                                                                          | 93  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                    | 95  |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN .....                                                                                               | 100 |
| BIODATA P ENULIS .....                                                                                                  | 130 |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran                              | Halaman |
|----|---------------------------------------------|---------|
| 1  | Surat Penetapan Pembimbing Skripsi          | 101     |
| 2  | Surat Izin Penelitian dari Kampus           | 102     |
| 3  | Surat Izin Penelitian dari PTSP             | 103     |
| 4  | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian | 104     |
| 5  | Pedoman Obsevasi Wawancara                  | 105     |
| 6  | Pedoman Wawancara                           | 112     |
| 7  | Surat Keterangan Wawancaea                  | 118     |
| 8  | Dokumentasi Wawancara                       | 123     |
| 9  | Hasil Turnitin                              | 129     |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin       | Nama                      |
|-------|------|-------------------|---------------------------|
| ا     | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan         |
| ب     | Ba   | b                 | Be                        |
| ت     | Ta   | t                 | Te                        |
| ث     | Tha  | th                | tedan ha                  |
| ج     | Jim  | J                 | Je                        |
| ح     | Ha   | ḥ                 | ha (dengantitik di bawah) |
| خ     | Kha  | kh                | kadan ha                  |
| د     | Dal  | d                 | De                        |
| ذ     | Dhal | dh                | de dan ha                 |
| ر     | Ra   | r                 | Er                        |
| ز     | Zai  | z                 | Zet                       |
| س     | Sin  | s                 | Es                        |
| ش     | Syin | sy                | esdan ye                  |
| ص     | Shad | ṣ                 | es (dengantitik di        |

|    |        |   |                            |
|----|--------|---|----------------------------|
|    |        |   | bawah)                     |
| ض  | Dad    | ḍ | de (dengantitik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ | te (dengantitik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengantitik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ‘ | Komaterbalikkeatas         |
| غ  | Gain   | g | Ge                         |
| ف  | Fa     | f | Ef                         |
| ق  | Qaf    | q | Qi                         |
| ك  | Kaf    | k | Ka                         |
| ل  | Lam    | l | El                         |
| م  | Mim    | m | Em                         |
| ن  | Nun    | n | En                         |
| و  | Wau    | w | We                         |
| هـ | Ha     | h | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | y | Ye                         |

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ‘ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | Fathah | a           | A    |
| إ     | Kasrah | i           | I    |
| أ     | Dammah | u           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|--------------|-------------|---------|
| اِيْ  | fathahdanya  | ai          | a dan i |
| اَوْ  | fathahdanwau | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                 | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| آ / اِيْ         | fathahdanalifatau ya | ā               | a dangaris di atas |
| إِيْ             | Kasrahanya           | ī               | i dangaris di atas |
| أَوْ             | Dammahdanwau         | ū               | u dangaris di atas |

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannahataurauḍatuljannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilahatau al- madīnatulfāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :Rabbanā

نَجَّيْنَا :Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَّ :nu‘ima

عَدُوُّ :‘aduwwun

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| عَرَبِيٌّ | : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) |
| عَلِيٌّ   | : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)        |

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                    |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                      |

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta’murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau’</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai’un</i>   |
| أَمْرٌ      | : <i>Umirtu</i>    |

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| Swt. | = | <i>subhānahū wa ta‘āla</i>          |
| Saw. | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>‘alaihi al- sallām</i>           |
| H    | = | Hijriah                             |
| M    | = | Masehi                              |
| SM   | = | Sebelum Masehi                      |

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| l.          | = | Lahir tahun                                      |
| w.          | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                    |

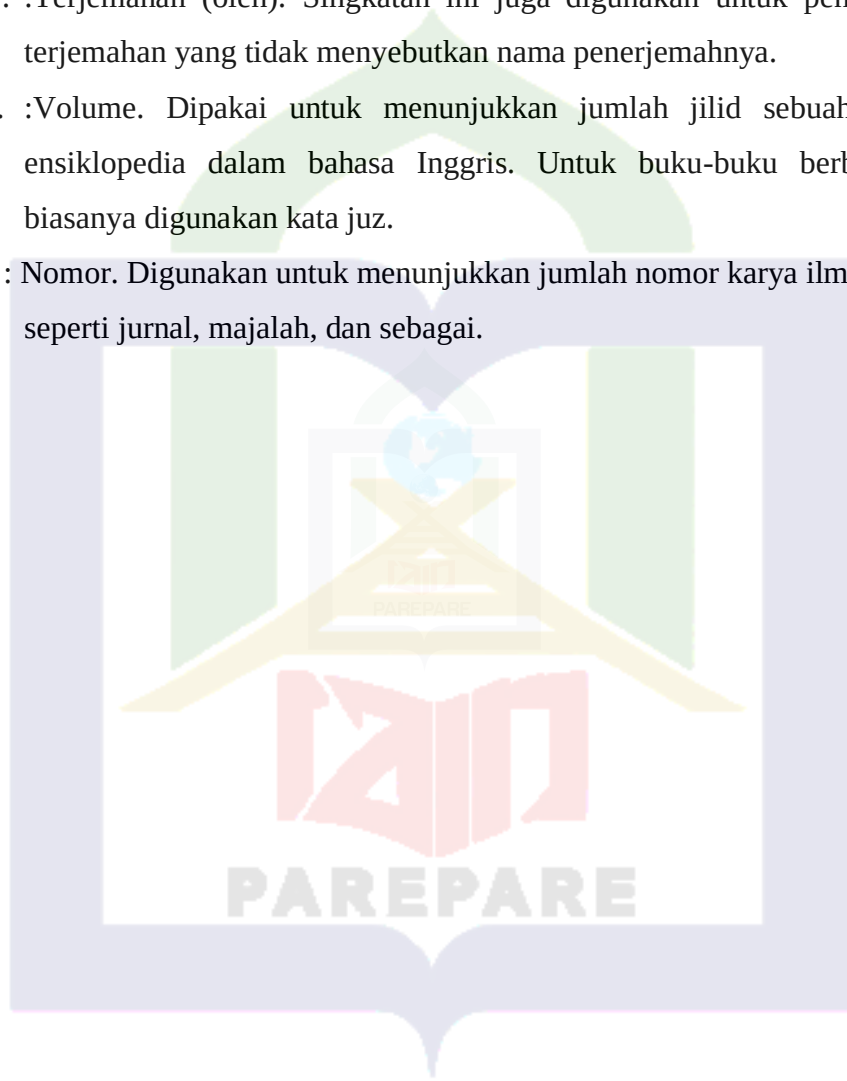
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| ص   | = | صفحة               |
| دون | = | بدون مكان          |
| صه  | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط   | = | طبعة               |
| دن  | = | بدون ناشر          |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ   | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isu pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, merupakan tantangan global yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik telah mencemari berbagai ekosistem, termasuk laut, yang mengancam keanekaragaman hayati, merusak terumbu karang, dan mengganggu keseimbangan ekologis.<sup>1</sup> Di Indonesia, tingginya produksi sampah plastik yang mencapai jutaan ton per tahun belum diimbangi dengan pengelolaan dan daur ulang yang memadai, sehingga menimbulkan krisis lingkungan yang serius. Kendala seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, lemahnya implementasi regulasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini. Oleh karena itu, edukasi dan kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatifnya secara efektif.<sup>2</sup>

Di tingkat nasional, upaya penanganan sampah plastik termasuk kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dengan target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Strategi ini meliputi peningkatan kesadaran pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM. Pendekatan kolaboratif ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan sampah plastik yang kompleks,

---

<sup>1</sup> Jurnal Ilmiah Et Al., "Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali: Mengapa Bisa Terjadi? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya?," *Jurnal Lingkungan*, Vol. 8 No. (2024).

<sup>2</sup> Terhadap Kesehatan Dan D A N Lingkungan, "Bahaya Plastik," 03.1.

terutama di wilayah pesisir dan laut yang rentan terhadap pencemaran.<sup>3</sup>

Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang jumlahnya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien, keberadaan limbah alam pasti akan mengakibatkan rusaknya organisme hidup di sekitarnya. Permasalahan ini menjadi semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dan masuk ke lingkungan menimbulkan dampak yang kompleks, misalnya memperburuk nilai estetika lingkungan, memperburuk kualitas sumber daya air, mengancam biota perairan, dan kesehatan manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diinput SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dari 338 kabupaten/kota pada tahun 2024, tercatat total timbunan sampah sebesar 36,9 juta ton pertahun. Dari jumlah tersebut, upaya pengurangan sampah baru mencapai 1,36% atau setara dengan 500.334,59 ton pertahun, sedangkan penanganan sampah mencapai 30,95% atau 11,9 juta ton per tahun. Secara keseluruhan, jumlah sampah yang terkelola mencapai 32,3% atau 11,9 juta ton per tahun, sementara sampah yang belum terkelola masih mencapai 67,7% atau 24,4 juta ton pertahun. Dari aspek infrastruktur pengelolaan, tercatat bahwa sistem TPA control/sanitary landfill menangani sekitar 5.904.453,95 ton pertahun, sedangkan TPA open dumping masih mendominasi dengan volume 9.594.446,32ton pertahun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pengelolaan sampah telah berjalan di Sebagian besar wilayah, tantangan besar masih ada dalam meningkatkan kapasitas pengurangan, memperluas pengelolaan yang terkontrol, dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Jurnal Ilmiah Et Al., “Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali : Mengapa Bisa Terjadi ? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya ?,” 8.6 (2024), Hal. 2032–41.

<sup>4</sup> Muh.Ridwan, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar*, 2024.

<sup>5</sup> Menteri Lingkungan, Hidup Dan, Dan Kehutanan Republik, “Portal Sipsn (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(Klhk), 2024,” 2022.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat di berbagai daerah pesisir, salah satunya di Pantai Cempae Kota Parepare. Sampah laut dan limbah di kawasan pesisir Pantai Cempae Kota Parepare telah menjadi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan intensitas arus kiriman sampah dari wilayah sekitar. Sampah yang berserakan di tanggul pantai tidak hanya berasal dari aktivitas lokal, tetapi juga kiriman dari wilayah lain, seperti Ujung Lero, yang terbawa arus laut hingga ke pesisir Cempae. Masalah ini mempengaruhi estetika kawasan wisata dan kenyamanan pengunjung, sekaligus berpotensi mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat setempat. Masalah sampah di kawasan pesisir, termasuk di Pantai Cempae, semakin mendesak untuk segera diatasi karena berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sampah yang didominasi oleh plastik, botol, kayu, dan limbah domestik tidak hanya mencemari ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga merusak keindahan serta daya tarik kawasan wisata, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan daerah dan kenyamanan pengunjung. Tingginya volume sampah yang terus bertambah akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan arus kiriman sampah dari wilayah lain membuat penanganan sampah di Pantai Cempae menjadi lebih kompleks dan menantang.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Cempae menghadapi tantangan serius akibat tingginya volume sampah, baik yang berasal dari aktivitas lokal maupun kiriman dari daerah lain. Sampah yang menumpuk, khususnya sampah plastik dan limbah kayu, tidak hanya merusak keindahan dan kenyamanan kawasan wisata, tetapi juga mengancam ekosistem laut serta kesehatan masyarakat sekitar. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya seperti penyediaan tempat sampah dan pembersihan rutin, hasilnya belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat,

---

<sup>6</sup> Gregorius Pain Purap, "Institut Teknologi Nasional," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2021), hal. 49–58.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, dan aparat keamanan. Pendekatan kemitraan ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sistem monitoring yang efektif. Contoh nyata kolaborasi seperti ini dapat ditemui di Parepare, di mana pemerintah bersama TNI dan komunitas lokal secara rutin melakukan kegiatan pembersihan pantai dan pemasangan alat penahan sampah di pesisir Pantai Cempae, walaupun tantangan alam dan sosial masih cukup besar. Pendekatan kemitraan berpotensi menjadi solusi efektif untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.<sup>7</sup>

Audit sampah menunjukkan bahwa lebih dari 50% sampah yang ditemukan di pesisir Parepare merupakan sampah plastik sejalan dengan tren nasional di kawasan pesisir Sulawesi Selatan. Jenis sampah plastik yang mendominasi antara lain *low-density polyethylene*, *polyethylene terephthalate*, *polystyrene*, dan *polypropylene*. Selain itu, ditemukan pula sampah kayu, sisa alat tangkap nelayan, pakaian, dan ban bekas yang menjadi masalah tambahan di kawasan tanggul Pantai Cempae.<sup>8</sup>

Kondisi timbulan sampah yang terus meningkat dan belum tertanganinya masalah pengelolaan sampah secara optimal di Pantai Cempae menunjukkan perlunya pola kemitraan dalam penanganan sampah di kawasan ini. Pendekatan kemitraan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Model collaborative governance seperti yang diterapkan di Teluk Penyau, Jawa Tengah, memperlihatkan keberhasilan melalui komunikasi intensif, pembagian peran yang jelas, dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Selain itu, kolaborasi

<sup>7</sup> “Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari Vol 3 No 1 , Agustus 2025 Hal 83-91 Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Analysis Of The Suitability Of The Cempae Beach Tourism Area , Soreang District , Parepare City 1 ) Mahasiswa Ilmu Kelautan FPIK Universitas Muslim Indonesia , Makassar 2 ) (2025), hal. 83–91.

<sup>8</sup> Sembiring Juwardi Syahputra Eko, Novianty Lily, “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone,” *Journal Of Engineering Research*, 10.1 (2023), Hal. 35–45.

multi-pihak di Kabupaten Pasuruan, yang melibatkan pengelolaan TPS terpadu dan edukasi masyarakat melalui mitra strategis seperti Project STOP, menjadi contoh nyata kemitraan efektif dalam pengelolaan sampah pesisir. Dengan adanya pola kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan, tantangan pengelolaan sampah di Pantai Cempae dapat ditangani secara lebih efektif dan berdampak positif pada kelestarian lingkungan serta kualitas hidup masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

Landasan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Indonesia diatur secara jelas dalam berbagai kebijakan dan regulasi nasional yang mendorong pelibatan multi-pihak secara sinergis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menegaskan peran penting masyarakat, pemerintah, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LHK No. P.13/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2016 memperkuat pelaksanaan program Bank Sampah sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan komunitas dan mendorong partisipasi aktif dalam pengurangan sampah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menggarisbawahi strategi nasional pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025 dengan fokus pada penguatan kelembagaan, pendanaan, dan pengelolaan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan-kebijakan ini membentuk kerangka hukum dan strategi yang menegaskan pentingnya kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam pengelolaan sampah nasional demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.<sup>10</sup>

Konsep kemitraan dalam pengelolaan sampah menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Model kemitraan ini berfungsi sebagai

<sup>9</sup> “Collaborative governance,” 2019.

<sup>10</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2008, hal. 1–46.

mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya, kapasitas, dan peran masing-masing pihak dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Pola kemitraan yang kuat mampu menciptakan sinergi yang efektif dalam pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan sampah, serta mendukung pencapaian target pengurangan sampah nasional seperti yang diwujudkan melalui inisiatif Project STOP dan berbagai kemitraan lokal yang berhasil mengurangi volume sampah secara signifikan.<sup>11</sup>

Di level lokal, Pantai Cempae menghadapi berbagai tantangan pengelolaan sampah yang kompleks, antara lain tingginya volume sampah plastik yang kiriman dari daerah sekitar, keterbatasan infrastruktur pengelolaan, dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Kondisi ini mengganggu fungsi ekologis dan sosial kawasan pesisir yang juga merupakan destinasi wisata dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan pendekatan inovatif dan keterlibatan multipihak untuk memperkuat kapasitas pengelolaan dan meningkatkan efektivitas penanganan sampah.<sup>12</sup>

Peluang kolaborasi terbuka dengan adanya berbagai inisiatif kemitraan di tingkat nasional dan lokal yang melibatkan pemerintah kota, komunitas lokal, LSM, serta sektor swasta. Contohnya, kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan Komunitas Pengelola Bank Sampah Jambangan telah berhasil menekan volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir hingga 50%-60% bulanan melalui mekanisme partisipatif dan teknologi inovatif. Keberhasilan ini membuka peluang bagi pengembangan pola kemitraan serupa di Pantai Cempae untuk mewujudkan lingkungan pesisir yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> P P Wardhani, "Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul)," *Journal Of Politic And Government Studies*, 9.2 (2020), Hal. 81–90, Doi:Ejournal.Undip.Ac.Id.

<sup>12</sup> Program Studi et al., "Arahan Pengelolaan Persampahan Di Kota Pare-Pare ( Studi Kasus : Kecamatan Bacukiki Barat ) Skripsi," 2023.

<sup>13</sup> Fasihul Lisa et al., "Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Jambangan Kota Surabaya," *Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia*, 10.1 (2024), hal. 37–56 <<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/13071>>.

Kemitraan dalam pengelolaan sampah berarti ada kerja sama antara berbagai pihak mulai dari pemerintah, warga, pelaku usaha, hingga komunitas lokal untuk bersama-sama menangani masalah ini. Melalui kerja sama ini, setiap pihak bisa saling melengkapi peran, seperti membuat kebijakan, mengedukasi masyarakat, menjalankan kegiatan teknis, hingga melakukan pengawasan. Namun pada kenyataannya, menjalin kemitraan bukan perkara mudah. Seringkali muncul kendala seperti komunikasi yang tidak lancar antar-pihak, tidak jelasnya pembagian tugas, serta perbedaan kepentingan. Meski begitu, masih ada banyak peluang untuk memperkuat kerja sama ini, misalnya lewat pelibatan komunitas lokal, pengembangan kapasitas organisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah.<sup>14</sup>

Kemitraan dalam pengelolaan sampah di Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah *Informal Plastic Collection Innovation Challenge* (IPCIC), yang berhasil membentuk 11 kemitraan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai inovator dari dalam dan luar negeri yang berfokus pada pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Dengan tujuan untuk mengurangi 70% sampah plastik pada tahun 2025, IPCIC berkontribusi pada perubahan sistemik di sektor pengelolaan sampah, mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Di tingkat lokal, kemitraan dalam penanganan sampah di Tanggul Pantai Cempae yaitu TPS3R dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). TPS3R adalah tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah pada skala kawasan atau komunal. Pengelolaan sampah di TPS3R dikhususkan kepada masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan atau masih termasuk kedalam sekitar lokasi TPS3R untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan TPS3R, dan

---

<sup>14</sup> Sri Afnitawaty Rizky, Alfian Prayoga Saputra, Dan Asropi, "Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.24.1 (2024), Hal. 12–29, Doi:<https://doi.org/10.17509/Jpp.V24i1.69274>.

diharapkan dapat menjadikan kondisi khususnya sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik<sup>15</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non-pemerintah yang dibentuk secara mandiri oleh sekelompok orang atau komunitas yang peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Dalam konteks penanganan masalah sampah, LSM berperan sebagai mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.<sup>16</sup>

Selain itu, kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan PT Gikoko Kogyo Indonesia menunjukkan bagaimana kolaborasi publik-swasta dapat meningkatkan manajemen persampahan di TPA Tamangapa. Dalam kemitraan ini, PT Gikoko Kogyo berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk memperbaiki manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kemitraan ini menjadi contoh penting bagaimana sektor swasta dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan.<sup>17</sup>

Kemitraan yang dibangun melalui berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta secara aktif, diharapkan dapat tercipta solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi pencemaran tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Inisiatif semacam ini perlu terus didorong dan diperluas agar dampaknya dapat dirasakan secara luas di seluruh Indonesia.

Pendekatan kemitraan dalam pengelolaan sampah yang telah diterapkan secara nasional mulai diadopsi di tingkat lokal, termasuk di Kota Parepare. Melalui kolaborasi

<sup>15</sup> Seri Yanti, "Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di TPS3R Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang," 2016, hal. 1–23.

<sup>16</sup> M.Pd Dr. Zubaedi, M.Ag., *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (kencana, 2013).

<sup>17</sup> Zulfan Nahrudin, "Kemitraan Publik-Privat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpa Tamangapa Kota Makassar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9.1 (2016), Hal. 11–20, Doi:<https://doi.org/10.31947/jgov.V9i1.231>.

intensif antara Pemerintah Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat keamanan sebagai TNI dan Polri, masyarakat setempat, serta lembaga swadaya masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan, berbagai kegiatan pengelolaan dan pembersihan sampah rutin dilaksanakan di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari aparat kecamatan, kelurahan, RT/RW, hingga kelompok masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kawasan pesisir yang menjadi destinasi wisata penting sekaligus pelindung ekosistem pesisir. Meskipun terdapat tantangan berupa tingginya volume sampah plastik dan kayu yang terbawa arus laut dan aktivitas manusia, kolaborasi multipihak ini telah berhasil mengumpulkan dan mengangkut sampah secara signifikan, serta memberikan dampak positif dalam mengelola kawasan wisata dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Pola kemitraan dalam penanganan masalah sampah di Tanggul Pantai Cempae melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan organisasi militer. Kolaborasi ini bertujuan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari pencemaran sampah yang sering terjadi akibat arus laut dan aktivitas manusia.

Salah satu contoh konkret dari kemitraan ini adalah kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Brigif 11 Badik Sakti, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, dan warga setempat. Kegiatan ini berlangsung pada 22 Februari 2023, di mana personil TNI berkolaborasi dengan DLH dan masyarakat untuk membersihkan tumpukan sampah di pesisir Tanggul Cempae.<sup>18</sup> Kegiatan yang dilakukan Brigif 11 Badik Sakti yang berkolaborasi dengan DLH dan masyarakat bertujuan untuk membersihkan tumpukan sampah di pesisir Tanggul Pantai Cempae sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sampah di pesisir Tanggul Cempae.

Dalam konteks ini, peran DLH sangat penting dalam mengoordinasikan kegiatan pembersihan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan

---

<sup>18</sup> Kompasiana, 'Pantai Tanggul Cempae Di Soroti Penuh Dengan Sampah'

sampah yang baik. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH, Muh Yusuf Aziz, menyatakan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan pembersihan sangat diapresiasi karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pencemaran di kawasan tersebut. Selain itu, pihak DLH juga telah menyiapkan fasilitas seperti tempat sampah di lokasi strategis untuk mendorong masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.<sup>19</sup>

Kemitraan ini juga mencakup kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pembuangan sampah yang benar. Dalam beberapa kegiatan sebelumnya, kelompok-kelompok masyarakat lokal telah diajak untuk berpartisipasi dalam program-program edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pencemaran sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Selain itu, pembentukan kelompok pengelola bank sampah juga menjadi bagian dari pola kemitraan ini. Kelompok ini bertugas untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan nilai ekonomi dari limbah yang dikelola. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan sampah.

Target Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut pemerintah Indonesia adalah untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% sebelum tahun 2025. Lima strategi utama digunakan dalam rencana ini: peningkatan kesadaran pemangku kepentingan, pengelolaan sampah darat, penanggulangan sampah pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, dan penguatan kelembagaan.<sup>20</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut,

---

<sup>19</sup> Muhammad Tohir, "Pantai Tanggul Cemape Penuh Sampah, Dlh Parepare: Anggota Secepatnya Turun," 2023 <<https://www.pijarnews.com/pantai-tanggul-cempae-penuh-sampah-dlh-parepare-anggota-secepatnya-turun/>>.

<sup>20</sup> Saiaran Pers, "Pemerintah Siapkan 5 Strategi Penanganan Sampah Laut," *Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*, 2019.

juga penting untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga penelitian dan organisasi non-pemerintah.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks di wilayah pesisir, yang secara ekologis rentan terhadap pencemaran dan secara sosial-ekonomi bergantung pada kualitas lingkungan laut. Salah satu wilayah pesisir yang menghadapi persoalan tersebut adalah Tanggul Pantai Cempae di Kota Parepare. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai dan ruang publik, tetapi juga sebagai destinasi wisata dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun, tingginya volume sampah baik yang berasal dari aktivitas lokal maupun kiriman dari wilayah lain melalui arus laut menjadikan kawasan ini rawan pencemaran lingkungan.<sup>21</sup>

Meskipun pola kemitraan tersebut telah berjalan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan. Berbagai kendala masih ditemui, seperti koordinasi antar-aktor yang belum optimal, pembagian peran yang kurang jelas, serta keberlanjutan program yang sangat bergantung pada kegiatan insidental. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kemitraan saja belum cukup tanpa pengelolaan hubungan antar-aktor yang terstruktur dan berkesinambungan.<sup>22</sup>

Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus mengkaji dinamika pengelolaan sampah berbasis pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae, terutama yang menelaah bagaimana hubungan antar-aktor terbentuk, bagaimana peran dan koordinasi dijalankan, serta bagaimana kendala dan keberlanjutan kemitraan tersebut dalam praktik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan

---

<sup>21</sup> Program Studi Ilmu Kelautan, "Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Cempae Kota Parepare," 2025.

<sup>22</sup> dan Asropi Sri Afnitawaty Rizky, Alfian Prayoga Saputra, "Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan, Jurnal Penelitian Pendidikan," 24 No. 1 (2024).

sampah atau kebijakan pemerintah, sementara dimensi sosial berupa dinamika kemitraan di tingkat komunitas pesisir masih relatif kurang mendapat perhatian.<sup>23</sup>

Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kegiatan seperti sosialisasi pemilahan sampah dari rumah hingga pelatihan daur ulang di berbagai daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan masalah ini.<sup>24</sup> Dengan dukungan teknologi dan pendidikan yang tepat, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Dinamika Pengelolaan Pola Kemitraan Di Tanggul Pantai Cempae.”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini telah dirumuskan menjadi pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare?
2. Faktor – factor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi keluarga broken home memengaruhi perilaku sosial dan keagamaan anak-anak. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi:

1. Untuk mengetahui bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.

<sup>23</sup> Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul).”

<sup>24</sup> Ambroise Brenier, ‘Cara Indonesia Memerangi Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Dari Sumbernya Di Darat’, *Worldbank.Org*, 2023.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terkait ini bertujuan untuk memverifikasi adanya studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mencakup:

1. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Muh.Ridwan , yang berjudul *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif observasional dan bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tergolong baik (76,5%), sikap masyarakat baik (60,3%), namun tindakan masih kurang baik (51,5%).<sup>25</sup>  
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengangkat isu pengelolaan sampah di konteks Sulawesi Selatan dan pentingnya peran masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah metode dan pendekatan sangat berbeda, metode dan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus-fokus sosial kultural.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara A. Aditya Prayoga yang berjudul *Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang

---

<sup>25</sup> Muh.Ridwan, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar*.

terjadi dalam pengelolaan permasalahan sampah di Kabupaten Bone khususnya daerah yang menjadi representative Kota Bone yakni Kecamatan Tanete Riattang. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup empat indikator: kondisi awal (starting conditions), desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan baik tetapi belum optimal. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kolaborasi antara aktor pemerintah dan masyarakat, sedangkan perbedaannya ada pada lokasi, teori, dan fokus—penelitian ini lebih menekankan dinamika sosial kemitraan di tingkat komunitas.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada adanya unsur kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah perbedaannya terletak pada lokasi, teori yang digunakan, serta fokus kajian di mana penelitian menekankan aspek tata kelola pemerintahan, dan peneliti lebih berorientasi pada dinamika sosial serta kemitraan di tingkat komunitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Febri Zulkarnain mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dengan judul “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan sampah di bidang kebersihan lingkungan dengan melihat dari mekanisme dari kemitraan tersebut yang memiliki indikator yaitu di bidang kontrak dan kesepakatan, bantuan dana, struktur, dan insentif menurut konsep hollow state. menggambarkan hasil dari pemusnahan Landfill Gas, dan manfaat bagi masyarakat sekitar TPA Tamangapa maupun masyarakat

---

<sup>26</sup> Syahputra Eko, Novianty Lily, “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.”

Pemulung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan mekanisme kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Gikoko Kogyo Indonesia melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) di TPA Tamangapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan berjalan baik pada tahap awal, namun menghadapi kendala administratif dan teknis pasca berakhirnya perjanjian dengan Bank Dunia. Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada kemitraan dalam pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terdapat pada konteks (TPA kota vs kawasan pantai) dan bentuk aktor yang terlibat (swasta vs komunitas lokal).<sup>27</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas sampah sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah di PT, sedangkan peneliti penanganan sampah pola kemitraan tanggul pantai cempae.

Dari ketiga penelitian tersebut, tampak bahwa studi terdahulu lebih banyak menyoroti perilaku masyarakat, tata kelola pemerintah, dan kemitraan formal antara pemerintah dan swasta. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji pola kemitraan berbasis komunitas di wilayah pesisir seperti di Tanggul Pantai Cempae. Inilah celah penelitian yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni menelaah bagaimana dinamika sosial dan hasil penanganan sampah melalui pola kemitraan di tingkat masyarakat pantai.

## **B. Landasan Teori**

### **Teori Struktural Fungsionalisme**

Teori Struktural Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan saling

---

<sup>27</sup> Febri Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar," *Universitas Hasnuddin*, 2018, Hal. 121, Doi:Core.Ac.Uk.

bergantung untuk menjaga stabilitas sosial dan keteraturan (Parsons, 1951). Setiap bagian, termasuk institusi, norma, dan kelompok sosial, memiliki fungsi spesifik yang mendukung keberlanjutan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam pengelolaan sampah, fungsi ini terlihat pada keterlibatan berbagai elemen sosial seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendukung yang berperan menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan secara terpadu. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antar elemen tersebut agar dapat tercapai kestabilan sosial dan kelestarian lingkungan (Nurfadhillah & Rahmawati, 2024; Praditya, 2023).<sup>28</sup>

Teori Fungsional Struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, Integritas, Fungsi, Koordinasi dan Konsensus. Konsep fungsionalisme maupun unsur-unsur normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Teori fungsional menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Parsons mengatakan bahwa teori-teori sosiologi modern tahun 1986, masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014).

Parsons menekankan pentingnya fungsi sosial yang menjaga keteraturan masyarakat, sedangkan Merton memperluasnya dengan konsep fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest adalah tujuan yang disadari (misalnya menjaga kebersihan

---

<sup>28</sup> Annisya Nurfadhillah Et Al., "Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bogor Melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme," 7.April (2024), Hal. 49–62.

pantai), sedangkan fungsi laten adalah dampak tidak langsung seperti meningkatnya solidaritas sosial (Merton, 1968).

Teori Struktural fungsional dikenal dengan teori fungsionalisme dan fungsionalisme struktural. Struktural Fungsional mempunyai dalam teorinya menekankan pada keteraturan. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap struktur maupun tatanan dalam sistem sosial akan berfungsi pula pada yang lain, sehingga bila tidak ada fungsional, maka stuktur ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Stuktur dan tatanan adalah merupakan fungsional bagi masyarakat tertentu. Teori ini cenderung memusatkan kajiannya pada fungsi dari suatu fakta sosial (*social fact*) terhadap fakta sosial lain. Talcott Parson maupun Robert K Merton dianggap sebagai struktural fungsionalist perspektif (*perspektif functionalism*) karena dua alasan, yaitu (1) menjelaskan hubungan fungsionalis dengan pendahulunya, terutama Durkheim, Brown dan Malinowski; (2) tokoh aliran ini menyebutnya dengan istilah fungsionalisme (Mere, 2007:90).

Teori fungsional Struktural yang sering disebut dengan teori integrasi atau teori konsensus yang dilahirkan oleh pemikir-pemikir klasik, diantaranya Socrates, Plato, Augus Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K Merton dan Talcot Parson. Mereka membicarakan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis phenomena sosial dan kultural. Langkah-langkah utama dalam elaborasi teori sosial yang menghadang aktor-aktor sosial yang meletakkan tantangan-tantangan yang dihadapi sistem sistem sosial bila ingin stabilitas sosial selalu terjaga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ivanka Angelina Dheyana Prasada, Ketut Sedana Arta, Dan I Wayan Putra Yasa, “Klenteng Su San Yee Di Kelurahan Banjar Jawa, Buleleng, Bali (Sejarah Dan Strukturnya Sebagai Potensi Media Pendidikan Multikultur),” *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10.2 (2022), Hal. 14–27, Doi:10.23887/Jjps.V10i2.42277.

Asumsi dasar dari pendekatan struktural fungsional ini adalah anggapan bahwa masyarakat terintegrasi atas kesepakatan para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut yang nantinya memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggotanya sehingga secara fungsional masyarakat terintegrasi menuju suatu bentuk ekuilibrium. Teori ini berfokus pada keteraturan dan mengabaikan konflik di masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan.

Dalam teori fungsional, Parsons mengartikan suatu fungsi sebagai kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin ada empat fungsi penting yang dibutuhkan semua sistem, yaitu *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* (L). Keempat fungsional ini dikenal dengan skema AGIL.

Fungsi dihubungkan sebagai segala kegiatan yang ditujukan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi, antara lain:

1. *Adaptation* (adaptasi) Berarti suatu keharusan bagi sistem sosial dalam menghadapi dan menanggulangi lingkungan di sekitar dengan baik. Sistem sosial tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan agar kebutuhannya dapat tercapai.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) Berarti suatu sistem harus melakukan tindakan yang berdasar pada semua tujuannya.
3. *Integration* (integrasi) Suatu sistem sosial menciptakan interrelasi antarpara anggotanya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). Dalam integrasi ini, para anggota harus bekerja sama demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

4. *Latency* (pola pemeliharaan) Sistem harus mempertahankan, memperbaiki, dan memperbarui, baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang mempertahankan dan menciptakan motivasi-motivasi itu.

Dalam skema AGIL: Pemerintah berperan dalam fungsi *Adaptation* dan *Goal Attainment* melalui kebijakan dan program pengelolaan sampah; Masyarakat menjalankan *Latency* dengan menjaga nilai kebersihan; LSM mendukung *Integration* dengan memperkuat kolaborasi; sedangkan TPS3R berperan pada *Adaptation* dan *Latency* melalui inovasi dan edukasi daur ulang sampah.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat di sini sebagai sistem yang memiliki struktur dan terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga mempunyai fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat modern maupun primitif. Misalnya, lembaga sekolah yang mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada pada generasi selanjutnya. Lembaga politik menjaga kestabilan sosial sebagaimana mestinya. Semua lembaga akan saling melakukan interaksi dan saling menyesuaikan yang bertujuan untuk keseimbangan. Apabila terjadi hal yang menyimpang, maka lembaga yang lainnya akan mengambil langkah penyesuaian.

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan sehingga melembaga. Pola-pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Caranya dengan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling

<sup>30</sup> Sean P Collins Et Al., “Landasan Teori Struktural Fungsional Talcott Person,” 2021, Hal. 167–86.

tinggi. Lalu pada tingkat integrasi menurut Parsons terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Cara yang kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan segala sesuatu yang ada di tingkat yang lebih rendah.

Teori fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Talcott Parsons ini dikembangkan oleh Sosiolog Eropa sehingga membuat teori ini bersifat empiris, positivistic, dan ideal. Ada asumsi bahwa tindakan manusia itu bersifat sukarela. Maksudnya ialah tindakan-tindakan manusia tersebut didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih alat atau sarana yang dibutuhkan. Tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi kondisi dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma.

Selain itu, Talcott Parsons menilai bahwa tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti. Sedangkan unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kata lain tindakan diasumsikan sebagai kenyataan sosial terkecil dan mendasar yang unsur unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Tindakan individu pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, dan individu itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantunya memilih tujuan dengan bimbingan nilai dan ide serta norma.<sup>31</sup>

Teori struktural fungsional menekankan bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup sistem sosial

---

<sup>31</sup> Dhayu Susanti, "Peran Penghayat Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Dalam Melestarikan Tradisi Suran Di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," *Theses Iain Kediri*, 2022, Hal. 29 <<https://etheses.iainkediri.ac.id/80/Id/Eprint/6369>>.

tersebut. Dengan demikian, setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran penting yang saling melengkapi guna menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae dapat dilihat sebagai salah satu fungsi sosial yang esensial untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Talcott Parsons, sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama yakni *Adaptation* (penyesuaian terhadap lingkungan), *Goal Attainment* (penetapan tujuan bersama), *Integration* (pemeliharaan kesatuan dan koordinasi antar elemen sosial), dan *Latency* (pemeliharaan pola budaya dan nilai). Dalam pengelolaan sampah, fungsi *Adaptation* terlihat dari kemampuan masyarakat dan berbagai lembaga dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan pantai yang rentan terhadap pencemaran. Fungsi *Goal Attainment* tercermin dari adanya tujuan bersama menjaga kebersihan dan kelestarian pantai demi kepentingan bersama baik dari sisi ekologi maupun ekonomi.

Selanjutnya, fungsi *Integration* dapat diamati melalui pola kemitraan antar stakeholder seperti pemerintah, komunitas lokal, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini menjadi mekanisme pemersatu yang memastikan setiap pihak berperan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Sedangkan fungsi *Latency* melibatkan upaya menjaga nilai dan norma kebersihan serta kesadaran kolektif yang mendukung keberlangsungan pola kemitraan.

Pandangan Merton memperkaya teori ini dengan membedakan fungsi manifest dan laten dari setiap tindakan atau struktur sosial. Fungsi manifest adalah tujuan yang disadari dan diinginkan, misalnya pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih. Sementara fungsi laten adalah efek tidak langsung yang muncul, misalnya memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab antar warga dalam menjaga lingkungan mereka.

Konsep merton tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. Karena itu, seorang sosiolog mesti bertanya: “berfungsi atau tidak berfungsi untuk siapa?”.

Merton dalam analisa fungsionalnya menambahkan gagasan Fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi Manifest adalah fungsi yang diharapkan dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Perbedaan yang dibuat oleh merton tentang fungsi manifest dan laten lebih jauh memperjelas analisa fungsional dan mengimbangi teori fungsional parsons.<sup>32</sup>

Dengan demikian, teori struktural fungsional memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana pola kemitraan dalam penanganan sampah di Tanggul Pantai Cempae tidak hanya menghasilkan fungsi yang nyata tapi juga membangun fungsi sosial yang memperkuat jaringan sosial dan nilai-nilai lingkungan. Kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan disfungsi sosial, yang dalam kasus ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan keseimbangan sosial masyarakat pesisir.

Dalam pengelolaan sampah, peran berbagai pihak sangat penting untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Berikut adalah uraian mengenai peran dan fungsi pemerintah, masyarakat, LSM, dan TPS3R dalam konteks landasan teori pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae:

- a. Pemerintah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pengelolaan sampah. Melalui berbagai dinas terkait, pemerintah menyediakan fasilitas dan membangun kemitraan dengan masyarakat serta

---

<sup>32</sup> Haura Nabila Dan Arif Rahman Hakim, “Banua Seribu Ayunan : Tradisi Baayun Maulid Sebagai Wisata Religi Berkelanjutan Di Masjid Keramat Banua Halat,” *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, 3.1 (2025), Hal. 1–14.

lembaga lain untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Peran ini juga mencakup fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan dalam teori struktural fungsional.<sup>33</sup>

- b. Masyarakat memegang peran sentral sebagai pelaku utama pengelolaan sampah dari sumbernya. Partisipasi aktif masyarakat melalui pemilahan sampah, gotong royong, dan bank sampah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Mereka juga berperan dalam menjaga nilai dan norma kebersihan yang berkelanjutan.<sup>34</sup>
- c. LSM menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. LSM berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta membantu mendorong keterlibatan aktif warga dalam program pengelolaan sampah. Mereka juga memperkuat integrasi sosial dalam kemitraan pengelolaan sampah.<sup>35</sup>
- d. TPS3R berperan sebagai fasilitas untuk pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle di tingkat komunitas. TPS3R membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan memberikan nilai ekonomi melalui pemanfaatan ulang limbah. Selain itu, TPS3R berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.<sup>36</sup>

Dengan demikian, analisis pengelolaan sampah dalam penelitian ini menggunakan kerangka struktural fungsional untuk memahami bagaimana pola

<sup>33</sup> Pemerintah Kecamatan Bahodopi Dan Bahodopi District Government, “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi,” 1.2 (2025), Hal. 41–57.

<sup>34</sup> Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo, Dan Akhmad Arif Amin, “Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan,” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal Of Natural Resources And Environmental Management)*, 8.1 (2018), Hal. 7–14, Doi:10.29244/Jpsl.8.1.7-14.

<sup>35</sup> Muhamad Khafid Rifai, Hartati Kartikaningsih, Dan Agus Susilo, “Optimalisasi Reduksi Sampah Dengan Keterlibatan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Perkotaan Di Tps-3r Janti Berseri Waru-Sidoarjo,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22.6 (2024), Hal. 1562–72, Doi:10.14710/Jil.22.6.1562-1572.

<sup>36</sup> Loang Baloq, “Jannah Dkk\_2024\_Hambatan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Loang Baloq,” 4.1 (2024), Hal. 89–94.

kemitraan antar aktor dapat menjamin kelangsungan fungsi sosial yang krusial. Pemerintah sebagai pelaku Adaptasi dan pencapaian tujuan menetapkan kebijakan dan pengawasan, masyarakat melakukan integrasi melalui pengelolaan langsung dan kesadaran kolektif, sementara LSM dan TPS3R menjaga fungsi Latency untuk mempertahankan nilai dan norma kebersihan secara berkelanjutan. Kegagalan dalam menjalankan fungsi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan lingkungan yang serius, menghambat keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan pantai penelitian.<sup>37</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Dinamika Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinamika merupakan gerak dari dalam, tenaga menggerakkan, ataupun semangat. Dinamika sendiri bisa diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara terus-menerus hingga mengakibatkan terjadinya perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Istilah dinamika biasa digunakan dalam berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, musik hingga sosial. Dinamika juga memiliki sifat dinamis yang bisa diartikan sebagai suatu hal yang tak bisa diam dan akan selalu berpindah. Jika dalam konteks individu atau kelompok, dinamika bisa diartikan sebagai sumber kekuatan agar bisa terus melakukan adaptasi serta penyesuaian diri dengan lingkungan.

Dinamika pengelolaan merujuk pada proses perubahan kontinyu, interaksi timbal balik, dan adaptasi dalam sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan faktor eksternal yang saling memengaruhi. Secara etimologis, "dinamika" berasal dari bahasa Yunani *dynamis* yang berarti kekuatan atau gerakan, sehingga dinamika pengelolaan menggambarkan bagaimana elemen-elemen pengelolaan (manusia, institusi, teknologi, lingkungan) bergerak, bereaksi, dan berevolusi terhadap tekanan internal maupun eksternal. Proses ini bersifat non-linear, di mana perubahan kecil pada

<sup>37</sup> Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar."

satu komponen dapat memicu transformasi sistemik yang signifikan, seperti fluktuasi inflow sampah musiman yang memerlukan penyesuaian strategi kemitraan.<sup>38</sup>

## 2. Pola Kemitraan

Pola Kemitraan dalam konteks pengelolaan sampah adalah model kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Pola ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan manfaat bersama (mutual benefit), sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh keuntungan sesuai kontribusinya.<sup>39</sup>

Beberapa karakteristik pola kemitraan pengelolaan sampah yang umum ditemukan adalah:

### a) Kesetaraan dan Keterbukaan

Semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Proses kemitraan dilakukan secara transparan dan inklusif.<sup>40</sup>

### b) Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Kerjasama ini dirancang agar setiap pihak mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Misalnya, masyarakat mendapatkan akses pengelolaan sampah yang lebih baik dan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah, sementara pemerintah dapat mengurangi beban biaya dan memperpanjang umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>41</sup>

### c) Kolaborasi Multi-Pihak

Melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, pengelola sampah, komunitas

<sup>38</sup> Sean P Collins Et Al., “Landasan Teori Struktural Fungsional Talcott Person,” 2021, Hal. 167–86.

<sup>39</sup> Fasihul Lisa And Others, ‘Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Jambangan Kota Surabaya’, *Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia*, 10.1 (2024), Pp. 37–56

<sup>40</sup> Wardhani, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul).” *Journal Of Politic And Government Studies*, 9.2 (2020), Pp. 81–90, Doi:Ejournal.Undip.Ac.Id.

<sup>41</sup> Lisa Et Al., “Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Jambangan Kota Surabaya.”

lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Contohnya, kemitraan antara Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) dengan Bank Sampah dan pemerintah kota yang saling mendukung operasional dan keberlanjutan pengelolaan sampah.<sup>42</sup>

d) **Fleksibilitas Mekanisme**

Pola kemitraan dapat berupa kerjasama langsung (MoU), sistem pembayaran berdasarkan volume sampah yang diangkut, atau model Public-Private Partnership (PPP) dengan sistem *Build-Operate-Transfer* (BOT) untuk pengelolaan infrastruktur sampah.<sup>43</sup>

e) **Efisiensi Bekelanjutan**

Melalui kemitraan, pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dari segi biaya dan operasional, serta mendukung pengurangan sampah yang masuk ke TPA melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan lokal seperti TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*).<sup>44</sup>

Contoh penerapan pola kemitraan yang berhasil dapat dilihat pada pengelolaan sampah di Surabaya dan Semarang, di mana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melalui Bank Sampah dan TPS 3R mampu mengurangi timbulan sampah hingga 50-60% dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.<sup>45</sup>

### 3. **Pengelolaan Sampah**

Sampah sekarang menjadi masalah bagi semua kalangan masyarakat. Perbedaan antara jumlah sampah yang diolah dan sampah yang dihasilkan menjadi tidak seimbang

<sup>42</sup> ' Isril, Rury Febrina, Dan Zulfa Harirah, "Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17.1 (2019), Hal. 60, Doi:10.35967/Jipn.V17i1.7059.

<sup>43</sup> Charles Kopioru, 'Analisis Kebijakan Kemitraan Kelola Sampah Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Di Kota Kupang', *Inovasi Kebijakan*, 7 No.1 (2022)

<sup>44</sup> Lisa Et Al., "Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Jambangan Kota Surabaya."

<sup>45</sup> Wardhani, "Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul)." Doi: Ejournal.Undip.Ac.Id

karena sampah semakin menumpuk setiap hari. Aktivitas manusia, pertumbuhan populasi, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap memengaruhi hal ini. Seiring kemajuan gaya hidup manusia, semakin banyak sampah yang diproduksi.

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

*"Kebersihan adalah sebagian dari iman."*

(HR. Muslim)

Krisis lingkungan hidup telah menjadi masalah pada abad saat ini, dikarenakan perkembangan teknologi yang telah membuat manusia lupa dengan keadaan sumber daya alam.<sup>46</sup> Dalam lingkungan hidup manusia dan ekosistem merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan, di mana pembangunan yang direncanakan oleh negara-negara yang sedang melakukan pembangunan harus di sertai pengawasan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk mencegah dampak yang buruk dalam pembangunan.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, sampah telah menjadi sebuah masalah yang sulit terselesaikan di Indonesia. Mengingat sulitnya untuk mengelola sampah menjadi bahan yang berguna dan kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya pengelolaan sampah. Sampah telah menyebabkan masalah yang perlu diselesaikan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga banjir yang diakibatkan aliran air tertutup dengan sampah.

Menurut Azwar menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang.<sup>47</sup> Dapat kita diperjelas memang sampah menjadi sebuah benda yang tidak berguna tetapi dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak sadar mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah.

<sup>46</sup> Tamaulina Br. Sembiring, "Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kosep Dan Teori)," 2022, Doi:[https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Konsep\\_Dan/Du9beaaaqbaj?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_Konsep_Dan/Du9beaaaqbaj?hl=en&gbpv=0).

<sup>47</sup> Sembiring, "Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kosep Dan Teori)."

Menurut Gunawan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks.<sup>48</sup> Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah volume sampah yang akan dikeluarkan sama jumlahnya dengan sampah yang digunakan. Sampah juga dapat disebut dengan bahan apapun atau sebuah benda yang sudah digunakan dalam suatu kegiatan apapun oleh manusia dan dibuang. Sampah yang ditimbulkan dengan volume yang banyak biasanya penggunaan suatu bahan dan benda hanya terpakai sekali saja lalu dibuang, sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin banyak karena kegiatan manusia sehari-hari dalam menggunakan benda atau bahan hanya sekali pakai.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Secara aturan pengelolaan sampah telah di atur secara kompleks oleh pemerintah, kebijakan yang telah diberikan wadah kepada masyarakat agar senantiasa dalam menjaga kebersihan.

Era saat ini kebanyakan masyarakat lebih tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dalam konteks pengelolaan sampah dibutuhkan hukum yang pasti dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab hingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>49</sup> Peran masyarakat selaku objek dalam pelaksanaan peraturan bisa berjalan optimal dan efektivitas penerapan peraturan tentang pengelolaan sampah tersebut. Melihat dari sudut kebijakan yang sangat kompleks diatur oleh pemerintah, diharapkan pemerintah bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada masyarakat agar masyarakat sadar mengenai pengelolaan sampah yang benar akan membawa pengelolaan

<sup>48</sup> Gradila Apriani, "Implementasi Pengelolaan Sampah," *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022.

<sup>49</sup> Aisyah Nur Ash Fiya, "Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat,"

Doi:[https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan\\_Prinsip\\_Hukum\\_Lingkungan\\_Dalam/Ljbueaaaqb\\_Aj?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Prinsip_Hukum_Lingkungan_Dalam/Ljbueaaaqb_Aj?hl=en&gbpv=0).

lingkungan yang baik pula.

Keputusan Permentu No.21/2006 menetapkan kebijakan untuk strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan sampah (KSNP-SPP). Uji coba dan pengembangan replikasi 3R di pemukiman harus dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah semaksimal mungkin. Hal ini juga untuk mencegah masalah sampah dan bahaya pencemaran lingkungan meningkat di masa mendatang.<sup>50</sup> Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan sampah yang diintegrasikan dengan konsep berbasis masyarakat (3R), yaitu Reuse, Reduse, dan Ryclye, harus terus dikembangkan dan diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain. Dengan demikian, proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat secara signifikan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kota.

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum / 30 : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

<sup>51</sup> Artinya : *“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”*.

Masalah sampah dapat diupayakan dengan adanya pengelolaan sampah yang baik dan benar.<sup>52</sup> Pengelolaan adalah proses umum yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terdapat beberapa Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan sampah di tanggul seperti:

<sup>50</sup> Prasetya. (2010) Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut Oleh Dinas Journal Of Publik Administrastion Research And Theory. Muq045 First Published Online August 19, 2010 Doi:10.1093/Jopart/Muq045

<sup>51</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya, Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2009, Hlm. 408.

<sup>52</sup> George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm. 15

#### a. Pembangunan Tanggul

Dampak abrasi pantai lainnya juga akan sangat terlihat di bibir pantai, karena garis pantai akan semakin bergeser ke arah daratan, menyebabkan lebih sedikit lahan tempat tinggal untuk penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Jika abrasi pantai tidak diatasi, daerah permukaan rendah akan tenggelam.

Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut dan arus laut yang kuat. Gejala alami dan tindakan manusia dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan atau abrasi Pantai tangan orang. Pada dasarnya, efek yang dihasilkan oleh proses abrasi pantai tidak dapat dihindari; namun, lamanya proses dan adanya faktor yang dapat mempercepatnya. Antara dampak abrasi pantai adalah kerusakan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove secara alami karena pengikisan terus-menerus. Kemudian, ekosistem dimana organisme tersebut lahir, tumbuh, mencari makan, dan hidup, rusak, dan hilangnya tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau, menyebabkan penurunan keanekaragaman organisme di sekitarnya.

#### b. 3R: reuse, reduce, and recycle

Pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan sampah dan mengurangi penimbunan sampah dengan menerapkan prinsip 3R: *reuse, reduce, and recycle*. hal ini dapat mendukung dinamika kolaborasi Masyarakat dan pemerintah dalam mendukung penyelesaian permasalahan sampah yang ada di tanggul.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:205)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ٢٠٥

*“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”*

Struktur keanggotaan TPS3R umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan pengolahan sampah reduce, reuse, recycle di tingkat komunitas:

- a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelaksana Konstruksi, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan fisik TPS3R. KSM ini memiliki struktur pengurus seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta seksi-seksi perencanaan, pelaksana, dan pengawas.
- b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola, yang fokus pada pengelolaan operasional TPS3R, termasuk kegiatan pemilahan, pengolahan sampah, dan pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan. KSM pengelola memiliki struktur pengurus mirip pelaksana dengan tanggung jawab di bidang manajemen dan operasional.
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan membantu memberikan bimbingan teknis serta sosialisasi.<sup>53</sup>

#### 4. Kemitraan Pengelolaan Sampah

Kemitraan dalam pengelolaan sampah adalah hubungan kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah poin-poin penting mengenai kemitraan penanganan sampah:

- a. Tujuan Kemitraan: Kemitraan bertujuan untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- b. Pihak yang Terlibat: Kemitraan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, masyarakat, LSM, sektor swasta formal dan informal, dan lainnya.
- c. Prinsip Kemitraan: Kemitraan dijalankan atas prinsip kesetaraan, adanya persamaan tujuan dan misi dalam mengatasi permasalahan sampah.

<sup>53</sup> Kementerian PUPR, "Direktorat Jendral Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman," *Buku Petunjuk Teknis Tps 3r , Tempat Pengelolaan Sampah 3r*, 2.4 (2017), Hal. 1–152.

- d. Pola Kemitraan: Salah satu pola kemitraan yang dapat diterapkan adalah *Linear Collaborative of Partnership*, di mana masing-masing pihak menjalankan tugas dan wewenangnya serta memperoleh manfaat.
- e. Kegiatan Kolaboratif: Kemitraan dapat melibatkan berbagai kegiatan kolaboratif, termasuk berbagi pengalaman dan keahlian terkait pengelolaan sampah, serta berbagi rekomendasi kepada pemerintah.
- f. Tantangan dalam Kemitraan: Kemitraan dapat menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antar pihak, perbedaan kepentingan, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.<sup>54</sup>
- g. Contoh Kemitraan:
  - a) Kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.
  - b) Kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.<sup>55</sup>
  - c) Kolaborasi Multi-pihak pada HPSN 2025 di Makassar.
  - d) Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R.<sup>56</sup>
  - e) Program USAID Selaras di Makassar dan Gowa

<sup>54</sup> Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar."

<sup>55</sup> Nahrudin, "Kemitraan Publik-Privat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpa Tamangapa Kota Makassar."

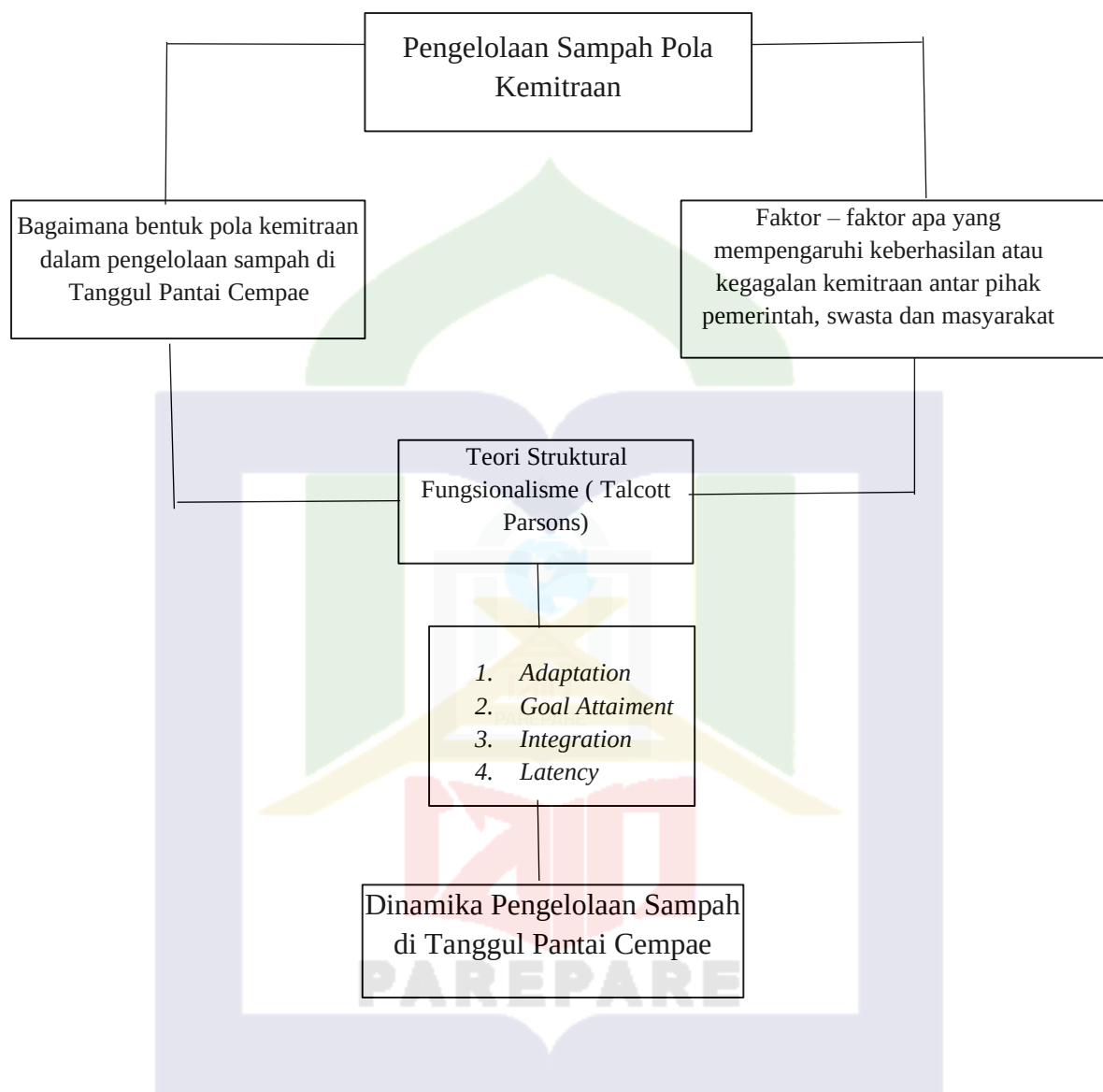
<sup>56</sup> ', Febrina, Dan Harirah, "Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru."

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian merupakan landasan konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji. Penyusunan kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur berpikir peneliti dalam menganalisis dinamika penanganan sampah pada kemitraan di Tanggul Pantai Cempae. Kerangka ini disusun berdasarkan kajian teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta kondisi empiris di lapangan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis antara konsep pengelolaan sampah, pola kemitraan, dan dinamika sosial di Pantai Cempae. Pertama, konsep pengelolaan sampah mencakup pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, LSM, dan fasilitas TPS3R. Model ini menekankan strategi tanggung jawab bersama yang diarahkan pada pengurangan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Pantai Cempae, pengelolaan sampah harus memperhatikan karakteristik lokal dan tantangan khusus kawasan pesisir yang rentan terhadap pencemaran serta perubahan lingkungan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar."



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae dalam penelitian ini akan berfokus dengan dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul pantai Cempae dan Faktor- Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Rumusan masalah pertama akan mengkaji Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae , penelitian ini akan mengkaitkan teori Struktural Fungsionalisme dengan bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah. Teori Struktural Fungsionalisme akan dikaitkan dengan Dinamika pengelolaan sampah pola kemitraan di tanggul pantai Cempae dalam melihat apa saja bentuk bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae dengan metode AGIL menurut Talcott Parson.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat akan dikaji melalui teori Struktural Fungsionalisme, alasanya, mengungkap untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.

Teori yang digunakan untuk mengkaji kedua objek permasalahan , kemudian akan menemukan hasil penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam proposal ini mengikuti pedoman penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengesampingkan referensi metodologi lainnya. Metode penelitian yang dijelaskan dalam buku ini mencakup beberapa aspek, antara lain jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tujuan penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

##### A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta pemikiran individu dan kelompok. Deskripsi ganda digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau tetap terbuka untuk penafsiran. Penelitian dengan pendekatan ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi (*to describe and to explore*), dan kedua, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian saya menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. John W. Creswell menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah bagian dari pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui observasi langsung dan wawancara.<sup>58</sup> Dengan demikian, penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk memahami dinamika kemitraan dalam penanganan sampah di kawasan pesisir Pantai Cempae.

---

<sup>58</sup> Mohammad Mulyadi, "Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol.15.1 (2011), hal. h. 134.

Artinya, penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai masyarakat setempat dan aparat yang bertanggung jawab di Tanggul Pantai Cempae.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Tanggul Pantai Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan pesisir dengan intensitas masalah sampah yang tinggi dan menjadi lokasi interaksi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian dilaksanakan selama 3 pekan, mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **C. Fokus Penelitian**

Menjelaskan dan menganalisis bagaimana pola kemitraan antara berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, komunitas, LSM, dan sektor swasta) terbentuk, dijalankan, serta tantangan dan hasilnya dalam penanganan sampah di kawasan tanggul Pantai Cempae. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, komunitas, LSM, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Cempae, serta mengevaluasi hasil dan dampak dari kemitraan tersebut. Seperti kabid pengelolaan sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan juga masyarakat setempat.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Peneliti akan menggunakan jenis data kualitatif, karena fokus penelitian ini adalah memahami proses sosial, interaksi antar aktor, serta bentuk-bentuk kerja sama dalam penanganan sampah. Data kualitatif memberikan informasi yang bersifat deskriptif dan mendalam, berupa pendapat, pengalaman, persepsi, serta narasi dari para pihak yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Data semacam ini tidak disajikan dalam

bentuk angka, melainkan melalui kata-kata, penjelasan, dan penjabaran konteks lapangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti petugas Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, penggerak komunitas, pelaku usaha lokal, dan warga pesisir) serta observasi langsung terhadap kegiatan penanganan sampah dan bentuk interaksi dalam kemitraan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan kegiatan dari pemerintah atau komunitas, kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah, arsip berita, dokumentasi visual (foto atau video kegiatan), serta bahan publikasi lain yang relevan.

Selain itu, jika dilihat dari bentuknya, data dalam penelitian ini mencakup data berupa teks/narasi (seperti hasil wawancara dan catatan observasi), data visual (foto atau dokumentasi lapangan), dan data dokumentatif (seperti surat kerja sama, proposal kegiatan, atau spanduk edukatif). Seluruh data ini digunakan untuk membangun pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana dinamika kemitraan terbentuk dan berperan dalam menangani persoalan sampah di lingkungan pesisir Pantai Cempae.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data yang berbeda yakni dari pemerintah dan juga sumber data dari Masyarakat. Dalam pengambilan data pada lingkup Pemerintah akan dikaji informasi dengan mengambil sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup

---

<sup>59</sup> F F Sirajudin, "Evaluasi Program Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bank Sampah Induk Patriot Bekasi di Kecamatan Mustikajaya ...," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, hal. 12.

Parepare. Sedangkan dalam lingkup Masyarakat akan dikaji informasi dari Masyarakat itu sendiri yang berpenduduk di sekitar tanggul Cempae.

Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai pihak dan dokumen yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti petugas Dinas Lingkungan Hidup, aparat kelurahan atau kecamatan, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, serta anggota komunitas lingkungan dan warga sekitar pantai. Informan ini dipilih karena memiliki peran dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan sampah di lapangan.<sup>60</sup> Selain itu, observasi langsung di lokasi juga menjadi sumber data penting untuk mendapatkan gambaran nyata tentang aktivitas penanganan sampah dan interaksi antar pihak.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder berupa dokumen resmi, seperti kebijakan daerah, laporan kegiatan dari pemerintah atau komunitas lingkungan, serta dokumentasi visual seperti foto dan video kegiatan bersih pantai. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan kombinasi sumber data primer dan sekunder tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai dinamika pola kemitraan dalam penanganan sampah di Tanggul Pantai Cempae.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>60</sup> Hazairin Thamrin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo Evaluation of Waste Management in City of Gorontalo," *Jambura Edu Biosfer Journal*, 4.1 (2022), hal. 2656–0526.

## 1. Observasi

Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.<sup>61</sup>

Mengamati secara langsung proses penanganan sampah dan bentuk kemitraan yang berlangsung di Pantai Cempae, baik kegiatan rutin, inisiatif komunitas, ataupun program kolaboratif yang sedang atau pernah dilakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan wawancara terbuka dengan informan.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana pola kemitraan antara berbagai pihak terbentuk dan dijalankan dalam penanganan sampah di wilayah pesisir, khususnya di tanggul Pantai Cempae. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran masing-masing aktor, dinamika interaksi antar pihak, serta kendala yang dihadapi dalam kerja sama pengelolaan sampah. Dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur, peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk memungkinkan informan menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas dan luas, sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian.

---

<sup>61</sup> Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda)," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6.2 (2018), hal. hal 94.

<sup>62</sup> Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqin Nur, "Metode pengumpulan data melalui wawancara," *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 2023, hal. 1–89.

Informan kunci dalam penelitian ini mencakup berbagai kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah, antara lain pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat kelurahan atau kecamatan, tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, komunitas atau relawan lingkungan, pelaku usaha di sekitar pantai, serta warga pesisir. Pemilihan informan dilakukan secara purposive (bertujuan), yaitu berdasarkan pengetahuan, peran, dan keterlibatan mereka dalam proses penanganan sampah dan pola kemitraan yang ada. Melalui wawancara dengan berbagai pihak ini, peneliti dapat menangkap berbagai perspektif dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali informasi seputar bentuk kemitraan yang terbentuk (apakah formal, informal, berbasis proyek atau swadaya), peran dan kontribusi masing-masing aktor, tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas koordinasi antar pihak, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk menggali harapan para pihak terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah di masa mendatang. Wawancara dilakukan dengan tetap menjaga etika penelitian, termasuk meminta izin perekaman, menjaga kerahasiaan informan, dan membangun hubungan yang baik agar data yang diperoleh jujur dan valid.

### 3. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

Dokumentasi berperan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang penting. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai jenis dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penanganan sampah dan pola kemitraan yang berlangsung di kawasan

Pantai Cempae. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan, sejarah kegiatan, bentuk kerja sama, hingga capaian atau kendala dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan.

Beberapa bentuk dokumentasi yang relevan dalam penelitian ini meliputi: surat keputusan atau kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, laporan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup atau komunitas lingkungan setempat, proposal atau nota kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, spanduk atau baliho imbauan kebersihan, serta dokumentasi visual seperti foto atau video kegiatan bersih pantai. Selain itu, artikel berita, media sosial komunitas, atau data statistik volume sampah yang berhasil dikumpulkan juga dapat dijadikan sumber dokumentasi yang mendukung.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kegiatan penanganan sampah dan dinamika kemitraan yang sudah berjalan selama ini. Data dokumenter juga berfungsi untuk memverifikasi informasi dari wawancara, dan dapat memperkaya analisis dengan bukti nyata dari aktivitas yang dilakukan oleh para aktor di lapangan. Oleh karena itu, dokumentasi menjadi bagian penting dari metode triangulasi data dalam penelitian kualitatif ini.

## **F. Teknik analisis Data**

Dalam penelitian ini, <sup>63</sup> model analisis interaktif digunakan dalam empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan:

### **1. Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pola kemitraan dan interaksi antar aktor dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Pengumpulan data difokuskan pada upaya

---

<sup>63</sup> Miles, Huberman & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (second edition). SAGE Publication. International Educational and Professional Publisher. London New Delhi.

mengungkap bagaimana kerja sama antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha dibangun serta dijalankan, termasuk kendala dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan di sekitar tanggul pantai.

Terdapat tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti petugas Dinas Lingkungan Hidup, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, penggerak komunitas, pelaku usaha lokal, dan warga sekitar pantai. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka terkait kemitraan dan penanganan sampah.

Selain itu, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi fisik lingkungan, kegiatan penanganan sampah, serta bentuk interaksi antar pihak yang terlibat. Observasi ini membantu peneliti memahami perilaku nyata di lapangan dan mendokumentasikan aktivitas yang relevan, seperti kegiatan bersih pantai atau kerja bakti lingkungan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan kegiatan, kebijakan, foto, video, maupun media publikasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas kemitraan dan pengelolaan sampah.

Melalui ketiga teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam untuk dianalisis, sehingga mampu menggambarkan dinamika sosial dan pola kerja sama yang terbentuk dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae.

## 2. Reduksi data

Proses reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang sangat penting. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hanya data yang relevan dan signifikan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola-pola penting yang muncul,

serta menghindari tumpukan informasi yang tidak terkait langsung dengan dinamika penanganan sampah dan kemitraan yang berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi data mencakup identifikasi informasi inti seperti bentuk kemitraan yang terbentuk (misalnya antara pemerintah dan komunitas), peran masing-masing pihak, aktivitas penanganan sampah yang dilakukan secara bersama, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Misalnya, jika dalam wawancara seorang informan menjelaskan adanya gotong royong mingguan yang difasilitasi oleh RT bersama dinas kebersihan, maka informasi ini dicatat sebagai bagian dari pola kemitraan dan bentuk partisipasi masyarakat. Sementara itu, pernyataan yang keluar dari konteks atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan atau disimpan sebagai data pendukung sekunder.

Reduksi data tidak hanya dilakukan sekali, melainkan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, dimulai sejak pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Proses ini membantu peneliti dalam menyusun kategorisasi atau tema-tema penting, seperti “jenis kemitraan,” “peran masyarakat,” atau “tantangan koordinasi,” yang akan digunakan dalam penyajian dan penarikan kesimpulan. Dengan melakukan reduksi data secara sistematis dan hati-hati, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih fokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai dinamika kerja sama dalam penanganan sampah di Pantai Cempae.

### 3. Penyajian Data (tampilan data)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, di mana data-data yang telah disaring kemudian disusun dan ditampilkan secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menampilkan informasi penting secara terstruktur mengenai pola kemitraan, peran aktor, dinamika interaksi, serta kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh kutipan

wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi pendukung lainnya seperti foto kegiatan, tabel, dan diagram jika diperlukan.

Secara umum, penyajian data dalam penelitian ini difokuskan pada pengelompokan informasi berdasarkan tema atau kategori yang muncul dari lapangan. Misalnya, data disusun dalam beberapa bagian seperti “Bentuk dan Pola Kemitraan”, “Peran dan Kontribusi Aktor”, “Kegiatan Penanganan Sampah”, serta “Tantangan dan Solusi”. Setiap bagian berisi hasil temuan yang dikaitkan dengan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat keabsahan data, serta penjelasan peneliti berdasarkan hasil observasi. Dengan demikian, pembaca dapat melihat bagaimana setiap aktor terlibat dalam proses penanganan sampah dan bagaimana kerja sama tersebut membentuk dinamika sosial tertentu di lingkungan Pantai Cempae.

Penyajian data juga bisa didukung oleh tabel matriks untuk merangkum temuan dari beberapa informan, seperti tabel peran masing-masing pihak atau bentuk kerja sama yang dilakukan. Selain itu, foto-foto kegiatan seperti aksi bersih pantai, sosialisasi lingkungan, atau gotong royong warga juga dapat dilampirkan untuk memberikan gambaran visual yang memperkuat narasi. Dengan penyajian data yang terstruktur dan rinci, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai bagaimana pola kemitraan dalam penanganan sampah terbentuk dan dijalankan di lokasi penelitian.

#### 4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di kawasan tersebut berjalan melalui pola kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat setempat, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha lokal. Kemitraan ini terbentuk secara kolaboratif dengan mekanisme kerja sama yang bersifat semi-formal dan informal, di mana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam pengelolaan sampah. Dinamika kemitraan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang positif, meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan

prasarana, kurangnya koordinasi yang optimal, serta tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pola kemitraan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai, sekaligus mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir. Namun demikian, efektivitas kemitraan ini sangat bergantung pada komitmen bersama serta dukungan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar pola kemitraan ini dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif jangka panjang terhadap pengelolaan sampah di Pantai Cempae.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah di Tanggul Pantai Cempae

Pembahasan mengenai pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae bertujuan untuk menjelaskan bentuk kerja sama yang terjalin antara berbagai pihak dalam menangani permasalahan sampah di kawasan pesisir. Melalui kemitraan ini, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sampah di Tanggul Pantai Cempae dilakukan melalui pola kemitraan yang melibatkan berbagai pihak sebagai upaya bersama dalam mengatasi permasalahan sampah di kawasan pesisir. Kemitraan ini dibentuk karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai aktor agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Dalam pelaksanaannya, kemitraan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, pemerintah kelurahan, masyarakat pesisir, aparat keamanan, pengelola TPS3R, bank sampah, serta komunitas lingkungan yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Sinergi antaraktor tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terkoordinasi, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lingkungan pesisir yang bersih serta nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH, diketahui bahwa :

“Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae meliputi DLH, pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, serta pengelola TPS3R dan bank sampah.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara Pribadi, 05 Desember, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihak-pihak tersebut meliputi Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah kelurahan sebagai penghubung dengan masyarakat, masyarakat sekitar sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah yang berperan dalam proses pemilahan, pengolahan, dan pengurangan volume sampah. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dilaksanakan melalui pola kemitraan yang menekankan kerja sama, koordinasi, dan partisipasi aktif seluruh pihak untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan tersebut tidak dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan melalui keterlibatan bersama antaraktor yang saling mendukung. Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pola kemitraan ini diwujudkan melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan, pengelolaan sampah, serta pemilahan sampah. Informan DLH menyebutkan bahwa :

“Kerja sama ini dijalankan melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan, serta pengelolaan dan pengangkutan sampah.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti aksi bersih pantai, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan

<sup>65</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

keterlibatan dan dukungan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan pantai yang bersih dan terjaga.

Selain itu, DLH juga melakukan kegiatan rutin berupa pendampingan TPS3R dan bank sampah, serta edukasi tentang pemilahan sampah dan pengurangan sampah plastik. Pola ini memperlihatkan bahwa kemitraan yang terbentuk tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan edukatif. Koordinasi antar pihak dalam pengelolaan sampah di Cempae dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi lapangan.

Hal ini diungkapkan oleh informan DLH yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi antar pihak dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi lapangan.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa Koordinasi dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae dilakukan melalui komunikasi langsung dan koordinasi di lapangan. Cara ini memudahkan setiap pihak yang terlibat untuk saling bertukar informasi, menyampaikan permasalahan, serta menentukan langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pola kemitraan, karena mampu memperkuat kerja sama antaraktor sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tugas masing-masing.

Meski demikian, bentuk koordinasi seperti ini masih menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya memiliki sistem kerja yang sangat terstruktur. Oleh karena itu, pola kemitraan yang berjalan masih berada pada tahap penguatan, terutama dalam pembagian peran dan kesinambungan program.

---

<sup>66</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

Dari sisi masyarakat, partisipasi belum berjalan merata. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa :

“Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan, komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut. Yang aktif itu orangnya itu-itu saja.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih belum merata. Kegiatan seperti bersih pantai umumnya diikuti oleh warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, bersama pihak kelurahan, komunitas lingkungan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, tidak semua masyarakat bersedia terlibat sehingga yang aktif berpartisipasi cenderung merupakan orang-orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pola kemitraan telah melibatkan berbagai pihak, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan menjadi tanggung jawab bersama.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerja sama, tingkat keterlibatan masyarakat masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam membangun pola kemitraan yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Selain rendahnya partisipasi, masih terdapat kendala dalam kejelasan pembagian peran.

Informan masyarakat menuturkan bahwa :

“Kami hanya diminta ikut bersih-bersih, tapi setelah itu siapa yang mengangkut dan mengelola sampahnya, kami juga tidak tahu.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae” (Wawancara Pribadi, 09 Desember, 2025).

<sup>68</sup> Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih terbatas pada kegiatan bersih-bersih. Masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas bagaimana proses pengangkutan dan pengelolaan sampah setelah kegiatan tersebut selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan belum sepenuhnya memberikan informasi dan pembagian peran yang jelas kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar masyarakat tidak hanya berperan dalam kegiatan kebersihan, tetapi juga memahami keseluruhan proses pengelolaan sampah sehingga dapat mendukung keberhasilan kemitraan secara lebih optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai alur pengelolaan sampah dalam kemitraan yang sedang dijalankan.

Keberadaan TPS3R juga menjadi bagian penting dalam pola kemitraan ini. Berdasarkan hasil wawancara, informan TPS3R menjelaskan bahwa:

“TPS3R ini baru mau di fungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru.”

Sementara itu, informan lain menyebutkan bahwa TPS3R memperoleh bantuan berupa alat dari Pertamina, yakni oven dan pencacah.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa peran TPS3R dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae belum berjalan secara optimal karena fasilitas tersebut baru akan difungsikan kembali setelah terbentuk kelompok pengelola yang baru. Meskipun demikian, TPS3R telah memperoleh dukungan dari pihak swasta, yaitu Pertamina, berupa bantuan peralatan seperti oven dan mesin pencacah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sektor swasta yang berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana. Namun, agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara

---

<sup>69</sup> Muh. Tahir, “Anggota TPS3R” (Wawancara Pribadi, 09 Mei, 2026).

maksimal, diperlukan penguatan kelembagaan dan pengelolaan TPS3R sehingga dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dukungan ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak swasta dalam memperkuat pengelolaan sampah di Cempae, walaupun perannya masih terbatas pada dukungan sarana. Dari sisi kelembagaan, kelurahan juga memiliki peran penting dalam membentuk struktur kerja TPS3R. Salah satu informan menyatakan bahwa :

“Pihak kelurahan yang tunjukkan, bentuk struktur, ini ketuanya, ini bendaharanya, ini sekretarisnya, ini yang bagian menimbang, bagian memilah, bagian sortir.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa pembentukan kelompok pengelola TPS3R dilakukan oleh pihak kelurahan dengan menetapkan struktur organisasi beserta pembagian tugas setiap anggota, seperti ketua, sekretaris, bendahara, petugas penimbangan, pemilahan, dan penyortiran sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, tetapi juga melalui penguatan organisasi dan pembagian peran yang jelas. Dengan adanya struktur kepengurusan tersebut, diharapkan setiap anggota dapat menjalankan tugasnya secara terarah sehingga pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae dapat berlangsung lebih efektif dan terorganisir.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kelurahan berfungsi sebagai pengatur awal dalam pembentukan kelembagaan dan pembagian tugas. Dengan demikian, kemitraan yang terbangun tidak hanya bersifat informal, tetapi juga mulai diarahkan ke dalam struktur kerja yang lebih jelas.

Secara umum, pola kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae sudah terbentuk melalui keterlibatan DLH, kelurahan, masyarakat, TPS3R, dan pihak swasta. Akan tetapi, kemitraan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, belum kuatnya koordinasi, dan program yang belum berjalan secara rutin. Jika

---

<sup>70</sup> Tahir, “Anggota TPS3R.”

dikaitkan dengan teori struktural fungsional, maka setiap unsur dalam kemitraan seharusnya menjalankan fungsi masing-masing agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan seimbang dan stabil. Karena itu, penguatan komunikasi, kejelasan peran, dan keberlanjutan program menjadi hal penting untuk menunjang efektivitas pola kemitraan di Cempae.

Temuan mengenai pola kemitraan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor-aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kemampuan membangun mekanisme kerja yang konsisten. Dalam konteks ini, kemitraan perlu dipahami sebagai proses sosial yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan, bukan sekadar struktur formal yang dibentuk pada awal program.

Berikut adalah rincian peran masing-masing aktor dalam pola kemitraan tersebut:

**a. Peran Pengurus TPS3R**

Kelurahan memiliki peran strategis dalam memperkuat pola kemitraan karena menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kelurahan membentuk struktur pengurus TPS3R yang mencakup ketua, bendahara, sekretaris, serta bagian penimbangan, pemilahan, dan sortir sampah. Pembentukan struktur ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan administratif, tetapi juga terlibat dalam membangun kelembagaan lokal agar pengelolaan sampah memiliki arah kerja yang lebih jelas.

TPS3R merupakan salah satu elemen penting dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di Cempae karena berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa TPS3R ini sebelumnya pernah berjalan pada tahun 2024, tetapi kemudian sempat tidak aktif dan baru akan difungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“TPS3R ini baru mau difungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru

karena kemarin sempat berjalan walau sebentar di tahun 2024”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa operasional TPS3R di kawasan Tanggul Pantai Cempae sempat berjalan pada tahun 2024, namun hanya berlangsung dalam waktu yang singkat sehingga saat ini perlu difungsikan kembali melalui pembentukan kelompok pengelola yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada adanya kelompok yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan operasional TPS3R. Oleh karena itu, pembentukan kelompok baru menjadi langkah penting untuk memperkuat pola kemitraan dan memastikan pengelolaan sampah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini memperlihatkan bahwa TPS3R masih dalam tahap pemulihan dan penguatan kelembagaan. Sumber sampah yang dikelola TPS3R sebagian besar berasal dari warga, dan ke depan juga diharapkan dapat menampung sampah dari pasar agar tidak menumpuk di tempat lain. Walaupun program belum berjalan penuh, TPS3R sudah memperoleh bantuan alat dari Pertamina berupa oven dan pencacah. Bantuan ini penting karena dapat mendukung proses pengolahan sampah, terutama sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan adanya dukungan tersebut, TPS3R memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain itu, TPS3R juga mulai dirancang untuk menjalankan program yang lebih inovatif, seperti budidaya magot untuk mengolah sampah organik dan sistem barter sampah dengan sembako. Rencana ini menunjukkan bahwa TPS3R tidak hanya bekerja pada aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan TPS3R menjadi bukti bahwa pola kemitraan di Cempae memiliki potensi untuk berkembang dari sekadar kegiatan kebersihan menjadi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

---

<sup>71</sup> Tahir, “Anggota TPS3R.”

TPS3R juga mulai merancang program baru, seperti budidaya magot untuk mengolah sampah basah dari pasar. Informan menjelaskan bahwa magot dapat diberi makan sisa sayuran, buah, dan makanan.

“Kami sedang berencana untuk membuat budidaya Magot dan makanannya ini berupa makanan sisa, sayuran, dan buah yang di dapatkan dari limbah/sampah yang ada di pasar.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPS3R, diketahui bahwa pengelola berencana mengembangkan budidaya maggot sebagai salah satu upaya mendukung pengelolaan sampah organik. Dalam rencana tersebut, maggot akan diberi pakan yang berasal dari sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan yang diperoleh dari limbah atau sampah pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mulai mengarah pada pemanfaatan sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai. Apabila rencana ini dapat direalisasikan, maka akan mendukung pengurangan volume sampah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan di kawasan Tanggul Pantai Cempae.

Untuk sampah anorganik, seperti plastik dan botol, warga diarahkan untuk memilah dan mengumpulkannya karena masih memiliki nilai jual. Bahkan, ada rencana penerapan sistem barter, di mana sampah yang ditimbang akan dikonversi menjadi sembako. Program ini menunjukkan bahwa TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Informan ketua RT menjelaskan bahwa:

“Dan untuk sampah organic, seperti plastik dan botol. Warga di arahkan untuk dikumpul dan di bawa ke TPS3R untuk di timbang karena memiliki nilai jual.

---

<sup>72</sup> Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral” (Wawancara Pribadi, 12 Mei, 2026).

Bahkan kitapun juga ada perencanaan melakukan sistem barter yang dimana sampah warga ditimbang akan dikonversi menjadi sembako.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ketua RT, diketahui bahwa masyarakat diarahkan untuk mengumpulkan sampah anorganik, seperti plastik dan botol, kemudian membawanya ke TPS3R untuk ditimbang karena memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pengelola juga berencana menerapkan sistem barter, yaitu sampah yang telah ditimbang akan dikonversi menjadi sembako sebagai bentuk insentif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian manfaat ekonomi. Dengan adanya program tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dapat meningkat sehingga pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, TPS3R masih menghadapi kendala besar karena partisipasi warga dalam memilah dan menyetor sampah masih rendah. Beberapa anggota baru juga menyatakan bahwa program belum berjalan maksimal dan masih banyak kegiatan yang baru sebatas kerja bakti atau pertemuan awal. Oleh karena itu, TPS3R masih membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, kelurahan, dan pihak lain agar dapat berfungsi secara optimal.

#### **b. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae. Dalam hasil wawancara, DLH menjelaskan bahwa kondisi sampah di kawasan tersebut masih belum stabil. Pada waktu tertentu pantai tampak bersih, terutama setelah dilakukan kegiatan bersih pantai atau kerja bakti, tetapi kebersihan itu tidak bertahan lama karena masih ada kebiasaan masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Informan DLH menegaskan:

---

<sup>73</sup> Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”

“Kondisi sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih bersifat tidak stabil. Pada saat tertentu terlihat bersih, khususnya setelah kegiatan bersih pantai atau gotong royong, namun tidak berlangsung lama karena masih adanya kebiasaan masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan”<sup>74</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa kondisi kebersihan di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih belum konsisten. Kawasan ini biasanya terlihat bersih setelah dilaksanakan kegiatan bersih pantai atau gotong royong, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena masih ada masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kegiatan pembersihan, tetapi juga pada kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pola kemitraan perlu didukung dengan upaya berkelanjutan, seperti edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, agar kebersihan kawasan dapat tetap terjaga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Cempae tidak cukup hanya dengan kegiatan pembersihan, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Peran DLH tidak hanya terbatas pada pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup penyediaan sarana prasarana, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak lain. Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Cempae meliputi DLH, pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, komunitas atau LSM lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Disebutkan pula bahwa:

“DLH berperan sebagai koordinator utama, sementara pihak lain mendukung melalui partisipasi tenaga, edukasi masyarakat, dan pengurangan sampah melalui pemilahan”<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

<sup>75</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

Hal ini memperlihatkan bahwa DLH berfungsi sebagai penggerak utama dalam pola kemitraan, sedangkan pihak lain berperan sebagai pendukung yang memperkuat jalannya pengelolaan sampah. DLH juga menjalankan program rutin seperti kegiatan bersih pantai, sosialisasi pengelolaan sampah, pendampingan TPS3R, dan edukasi pemilahan sampah. Dalam wawancara dijelaskan bahwa:

“DLH memiliki beberapa program, seperti kegiatan bersih pantai rutin, sosialisasi pengelolaan sampah, serta pendampingan TPS3R dan bank sampah”<sup>76</sup>.

Program-program ini menunjukkan bahwa DLH berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penanganan fisik sampah, tetapi juga pada pembentukan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, DLH berusaha menciptakan perubahan yang lebih mendasar dan tidak hanya sesaat. Namun demikian, DLH juga mengakui masih adanya kendala yang cukup besar. Keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan yang terus muncul dalam pelaksanaan kemitraan. Informan menegaskan bahwa kendala utama yang dihadapi DLH adalah :

“Keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta masih rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai”.<sup>77</sup>

Dinas Lingkungan Hidup DLH memegang posisi yang sangat penting dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae karena menjadi pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, DLH berperan sebagai pengelola utama yang menangani pengangkutan sampah, penyediaan sarana prasarana, serta pembinaan dan koordinasi dengan pihak lain yang terlibat. Peran ini menunjukkan bahwa DLH tidak hanya bekerja pada aspek teknis, tetapi

<sup>76</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

<sup>77</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

juga menjadi penggerak awal terbentuknya kerja sama lintas aktor dalam pengelolaan sampah pesisir.

Karena itu, DLH lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, dan pembagian peran yang lebih jelas. Dalam konteks ini, DLH tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjaga agar kemitraan tetap berjalan.

Selain menjalankan fungsi koordinasi, DLH juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Dalam wawancara disebutkan bahwa DLH memiliki program rutin seperti bersih pantai, sosialisasi kebersihan, serta pendampingan TPS3R dan bank sampah. Hal ini penting karena perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan pengangkutan sampah, tetapi juga harus disertai proses penyadaran yang berkelanjutan.

Keberadaan DLH sebagai koordinator utama menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbangun di Tanggul Pantai Cempae masih sangat bergantung pada peran pemerintah daerah. Namun, dominasi peran ini sekaligus menjadi tantangan karena keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh kemampuan DLH dalam menjaga komunikasi, membagi peran, dan memastikan keterlibatan seluruh mitra secara konsisten. Dengan demikian, DLH bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga aktor penghubung yang menentukan keberlangsungan pola kemitraan dalam pengelolaan sampah.

### **c. Peran Kelurahan**

Kelurahan memiliki peran strategis dalam memperkuat pola kemitraan karena menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kelurahan membentuk struktur pengurus TPS3R yang mencakup ketua, bendahara, sekretaris, serta bagian penimbangan, pemilahan, dan sortir sampah. Pembentukan struktur ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan administratif, tetapi juga terlibat

dalam membangun kelembagaan lokal agar pengelolaan sampah memiliki arah kerja yang lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, kelurahan tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga berperan langsung dalam pembentukan struktur pengurus TPS3R. Salah satu informan ketua RT menyampaikan bahwa:

“Kelurahan sangat berperan penting sekali karena pihak kelurahan yang tunjukkan, bentuk struktur, ini ketuanya, ini bendaharanya, ini sekretarisnya, ini yang bagian menimbang, bagian memilah, bagian sortir, itu semua kelurahan yang bentuk”<sup>78</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa pihak kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae, khususnya dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan TPS3R. Kelurahan bertanggung jawab membentuk struktur organisasi dengan menetapkan ketua, sekretaris, bendahara, serta membagi tugas kepada anggota yang bertanggung jawab pada penimbangan, pemilahan, dan penyortiran sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan, kelurahan berperan sebagai penggerak organisasi yang memastikan setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelurahan berfungsi sebagai pengatur awal yang memastikan ada pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan sampah.

Kelurahan juga memiliki peran dalam mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu informan menjelaskan bahwa kelurahan bersama mitra menghimbau warga agar membawa sampah ke TPS3R dan tidak membuang sampah sembarangan. Peran ini penting karena keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk mengikuti sistem yang telah disiapkan. Tanpa dukungan warga, program yang sudah dibentuk akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>78</sup> Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”

Dalam wawancara disebutkan bahwa program yang dilakukan kelurahan bersama mitra adalah menghimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan menyalurkan sampah ke TPS3R. Peran ini penting karena keberhasilan pengelolaan sampah sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memilah dan menyerahkan sampah pada tempat yang telah disiapkan. Tanpa dukungan warga, sistem pengelolaan yang sudah disusun akan sulit berjalan secara efektif.

Selain membentuk struktur, kelurahan juga berperan dalam mengoordinasikan pihak-pihak yang terlibat, seperti RT, RW, staf kelurahan, dan pihak swasta seperti Pertamina. Dalam wawancara, informan menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah ketua RT, RW, staf kelurahan, dan Pertamina. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, lembaga pengelola, dan mitra pendukung eksternal agar program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terarah.

Salah satu informan ketua RT menyampaikan bahwa:

“Ketua RT, RW, staf kelurahan, dan juga Pertamina”<sup>79</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae melibatkan berbagai pihak, seperti ketua RT, RW, staf kelurahan, dan Pertamina. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan dibangun melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang saling mendukung sesuai dengan peran masing-masing. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan mampu meningkatkan kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

---

<sup>79</sup> Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral.”

Bantuan dari Pertamina berupa alat pencacah dan oven menjadi modal penting untuk mengaktifkan kembali TPS3R. Ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak bekerja sendiri, tetapi membangun jejaring dukungan agar pengelolaan sampah memiliki sumber daya yang lebih memadai.

Walaupun begitu, kelurahan juga menghadapi kendala berupa masih rendahnya partisipasi masyarakat. Informan menyatakan bahwa masih banyak warga yang kurang berpartisipasi. Karena itu, kelurahan terus mendorong warga agar lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan demikian, peran kelurahan dapat dipahami sebagai penggerak lokal yang menjembatani kebijakan, pengorganisasian warga, dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Salah satu informan ketua RT menyatakan bahwa:

“Masih banyaknya warga yang kurang berpartisipasi karena itu sehingga program ini belum berjalan maksimal.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT, diketahui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Masih banyak warga yang belum aktif terlibat dalam kegiatan yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan program pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pola kemitraan tidak hanya bergantung pada kerja sama antarinstitusi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat agar setiap program yang dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

#### **d. Keterlibatan Masyarakat dan Aktor Pendukung**

Selain DLH, pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae melibatkan pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, komunitas lingkungan, TPS3R, dan pihak swasta. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat

---

<sup>80</sup> Yuliana, “Ketua RT.03 Sentral” (Wawancara Pribadi, 08 Mei, 2026).

dan berinteraksi langsung dengan kawasan pantai. Namun, partisipasi masyarakat masih belum merata. Sebagian warga aktif terlibat dalam kegiatan kebersihan, sementara sebagian lainnya cenderung pasif.

Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa:

“ Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut. Yang aktif itu orangnya itu-itu saja ”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae masih didominasi oleh warga yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Tidak semua masyarakat bersedia terlibat, sehingga kegiatan pengelolaan sampah sering kali hanya dilakukan oleh orang-orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang telah dibangun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan seluruh warga agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat juga mengakui adanya kerja sama dengan pemerintah, meskipun belum memahami secara jelas bentuk dan mekanisme kemitraan tersebut. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa:

“ Saya tahu ada kerja sama dengan pemerintah, terutama DLH. Tapi kalau ditanya bentuk kerjanya seperti apa, kami tidak terlalu paham ”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat telah mengetahui adanya kerja sama antara pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Namun, sebagian

---

<sup>81</sup> Bapak Sudirman, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae” (Wawancara Pribadi, 09 Desember, 2025).

<sup>82</sup> Bapak Sudirman, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

masyarakat masih belum memahami secara jelas bentuk kerja sama, mekanisme pelaksanaannya, maupun peran masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang telah dibangun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Masyarakat pesisir berperan sebagai pelaksana utama di lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat partisipatif-semiaktif. Artinya, masyarakat hadir dan terlibat, tetapi belum sepenuhnya berinisiatif dalam merancang dan mengelola program pengelolaan sampah secara mandiri.

Masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Cempae. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kondisi kebersihan pantai masih belum sepenuhnya baik. Salah satu warga mengatakan:

“Kalau dibilang bersih, belum sepenuhnya. Kadang memang terlihat bersih, apalagi setelah ada kerja bakti, tapi tidak lama kemudian sampah muncul lagi, terutama sampah plastik yang terbawa ombak”.<sup>83</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kebersihan pantai masih bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia serta sampah kiriman dari laut.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan pantai juga belum merata. Ada warga yang aktif ikut kerja bakti bersama DLH, kelurahan, atau komunitas lingkungan, tetapi masih banyak yang belum terlibat. Informan menyebutkan bahwa:

“Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan, komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut. Yang aktif itu orangnya itu-itu saja”.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif masyarakat belum terbentuk secara kuat. Akibatnya, beban pengelolaan sampah masih bertumpu pada kelompok yang sama.

Masyarakat sebenarnya mendukung kegiatan kebersihan, tetapi mereka menilai bahwa program tersebut belum berjalan secara rutin. Dalam wawancara disebutkan bahwa masyarakat senang karena pantai menjadi lebih bersih, namun dampaknya masih sementara. Bahkan ada warga yang berharap agar kegiatan kebersihan dijadwalkan secara rutin, disertai tempat sampah yang cukup dan pembagian tugas yang jelas. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak upaya pengelolaan sampah, tetapi menginginkan keberlanjutan yang lebih nyata.

Selain berdampak pada lingkungan, kebersihan pantai juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi warga. Salah satu informan menyatakan bahwa ketika pantai bersih, pengunjung lebih nyaman dan pedagang menjadi lebih ramai. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat bukan hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Karena itu, penguatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama agar kemitraan pengelolaan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Aktor pendukung lain yang memiliki peran penting adalah TPS3R, bank sampah, dan pihak swasta. DLH menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Cempae meliputi pemerintah kelurahan, masyarakat sekitar, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Bentuk dukungan yang diberikan pun beragam, mulai dari tenaga untuk kegiatan bersih pantai, edukasi kebersihan, hingga dukungan sarana dan pengolahan sampah. Kehadiran aktor-aktor ini memperkuat pola kemitraan karena masing-masing memiliki kontribusi berbeda yang saling melengkapi.

Dari sisi kelembagaan, TPS3R menjadi salah satu aktor pendukung yang sangat penting meskipun masih dalam tahap pengaktifan kembali. TPS3R sudah memperoleh bantuan dari Pertamina berupa oven dan pencacah, yang menunjukkan adanya dukungan dari sektor

---

<sup>84</sup> Bapak Sudirman, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

swasta dalam memperkuat fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, kelurahan juga berperan membentuk struktur pengurus dan membagi tugas secara lebih jelas, seperti bagian pemilahan, penimbangan, dan sortir sampah. Dengan adanya dukungan kelembagaan dan sarana tersebut, pola kemitraan di Cempae memiliki dasar yang cukup untuk berkembang, meskipun tetap memerlukan peningkatan partisipasi warga agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **2.1 Hasil Pengelolaan Sampah Melalui pola kemitraan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare, diketahui bahwa pengelolaan sampah melalui pola kemitraan telah menunjukkan hasil yang cukup positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Kemitraan yang dibangun melibatkan berbagai unsur, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kelurahan, pengelola TPS3R, kelompok masyarakat, komunitas lingkungan, serta masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, aksi bersih pantai, pengangkutan sampah secara rutin oleh DLH, penyediaan tempat sampah, sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan, hingga penguatan fungsi TPS3R sebagai pusat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kehadiran berbagai bentuk kegiatan tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama antarlembaga yang mulai terbentuk dalam upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

"Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Pantai Cempae memberikan hasil yang cukup nyata terhadap peningkatan kebersihan kawasan pantai. Kegiatan bersih pantai

yang dilakukan secara kolaboratif mampu mengurangi tumpukan sampah dan menjaga kebersihan pantai pada waktu tertentu. Selain itu, adanya keterlibatan berbagai pihak juga berkontribusi pada meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal."<sup>85</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan telah menghasilkan perubahan terhadap kondisi lingkungan Pantai Cempae. Walaupun perubahan tersebut belum bersifat permanen, kegiatan kolaboratif mampu menurunkan volume sampah pada waktu-waktu tertentu sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan pesisir.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat. Salah seorang warga Pantai Cempae menyampaikan bahwa:

"Kalau dibilang bersih, belum sepenuhnya. Kadang memang terlihat bersih, apalagi setelah ada kerja bakti, tapi tidak lama kemudian sampah muncul lagi, terutama sampah plastik yang terbawa ombak."<sup>86</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah melalui pola kemitraan masih menghadapi tantangan berupa sampah kiriman dari laut dan rendahnya kedisiplinan sebagian masyarakat. Dengan demikian, kebersihan pantai yang tercipta setelah kegiatan gotong royong belum dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama.

Selain memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, pola kemitraan juga mulai memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Seorang informan menyampaikan bahwa:

---

<sup>85</sup> Arhamdi, "Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup."

<sup>86</sup> Bapak Sudirman, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae."

"Ada perubahan, walaupun belum besar. Kalau pantai bersih, pengunjung lebih nyaman dan pedagang juga bisa lebih ramai. Tapi karena tidak rutin, dampaknya belum maksimal."<sup>87</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pantai yang bersih memiliki hubungan langsung dengan meningkatnya kenyamanan pengunjung sehingga memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pelaku usaha di sekitar kawasan wisata.

Temuan tersebut diperkuat kembali oleh informan lain yang mengatakan:

"Pantai yang bersih secara langsung meningkatkan jumlah pembeli di lapak-lapak UMKM sekitar."<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa bahwa kebersihan kawasan Tanggul Pantai Cempae memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan pantai. Kondisi pantai yang bersih membuat pengunjung merasa lebih nyaman untuk datang dan berwisata, sehingga jumlah pembeli di lapak-lapak UMKM meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui meningkatnya aktivitas usaha dan kunjungan wisata.

Data tersebut memperlihatkan bahwa hasil pengelolaan sampah melalui pola kemitraan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kebersihan lingkungan mampu meningkatkan daya tarik wisata sehingga aktivitas perdagangan masyarakat menjadi lebih hidup.

---

<sup>87</sup> Bapak Sudirman, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae."

<sup>88</sup> Ibu Andi Sri Utami, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae."

Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator utama. DLH bekerja sama dengan pemerintah kelurahan, masyarakat, komunitas lingkungan, serta TPS3R dalam melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH:

"Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae meliputi DLH, pemerintah kelurahan, TNI, masyarakat sekitar, komunitas atau LSM lingkungan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Kerja sama ini dijalankan melalui kegiatan bersih pantai, sosialisasi kebersihan, serta pengelolaan dan pengangkutan sampah."<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa DLH tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga berfungsi sebagai koordinator yang menghubungkan seluruh unsur kemitraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan DLH dalam membangun koordinasi dengan pemerintah kelurahan, masyarakat, dan TPS3R sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara terpadu.

Selain DLH, pemerintah kelurahan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pola kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT yang terlibat dalam kegiatan kelurahan, diketahui bahwa pemerintah kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada warga.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

---

<sup>89</sup> Arhamdi, "Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup."

"Membantu menghimbau warga/masyarakat untuk membawa sampahnya ke TPS3R."

90

Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan persuasif. Selain memberikan imbauan, kelurahan juga berperan dalam mengatur pembagian tugas pada pengelolaan TPS3R sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas.

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

"Setiap bidang bekerja sesuai bidangnya seperti pemilah tugasnya memilah sampah, penimbang bertugas menimbang sampah, penanggung jawab bertugas membuat media sosial terkait TPS3R dan meng-update tiap ada kegiatan."<sup>91</sup>

Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan telah menerapkan prinsip kerja sama yang terorganisasi. Setiap anggota menjalankan fungsi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan Pantai Cempae.

Dalam pelaksanaan kemitraan, TPS3R juga menjadi salah satu unsur yang memiliki peran strategis. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota TPS3R diketahui bahwa keberadaan TPS3R saat ini sedang diaktifkan kembali setelah dilakukan pembentukan kelompok pengelola yang baru.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"TPS3R ini baru mau difungsikan kembali setelah pembentukan kelompok baru karena kemarin sempat berjalan walau sebentar di tahun 2024." <sup>92</sup>

<sup>90</sup> Yuliana, "Ketua RT.03 Sentral."

<sup>91</sup> Yuliana, "Ketua RT.03 Sentral."

<sup>92</sup> Tahir, "Anggota TPS3R."

Informasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan TPS3R menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan beroperasinya kembali TPS3R diharapkan proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah dapat berjalan lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, anggota TPS3R juga menjelaskan bahwa sumber sampah yang dikelola sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar kawasan Pantai Cempae. Pengelola TPS3R menyatakan bahwa:

"Sejauh ini dari warga."<sup>93</sup>

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan di Pantai Cempae telah menerapkan prinsip kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan fungsi masing-masing. Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa setiap unsur dalam sistem sosial memiliki fungsi tertentu yang saling melengkapi untuk menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks penelitian ini, DLH menjalankan fungsi koordinasi, pemerintah kelurahan menjalankan fungsi pembinaan, TPS3R menjalankan fungsi pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat menjalankan fungsi partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Salah seorang warga menyampaikan bahwa:

"Biasanya yang ikut itu warga sekitar yang memang peduli, kadang dari kelurahan, komunitas lingkungan, sama DLH. Tapi jujur saja, tidak semua warga mau ikut. Yang aktif itu orangnya itu-itu saja."<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Tahir, "Anggota TPS3R."

<sup>94</sup> Bapak Sudirman, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pola kemitraan masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat. Partisipasi yang belum merata menyebabkan kegiatan kebersihan masih bergantung pada kelompok masyarakat tertentu sehingga keberlanjutan program belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan TPS3R mulai memberikan kontribusi dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH:

"TPS3R berperan dalam mengelola sampah yang dikumpulkan dari masyarakat melalui proses pemilahan dan pengolahan, khususnya sampah yang bernilai ekonomis." <sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa TPS3R memiliki peran penting dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae, yaitu mengelola sampah yang telah dikumpulkan masyarakat melalui proses pemilahan dan pengolahan, terutama sampah yang memiliki nilai ekonomis. Peran tersebut menunjukkan bahwa TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan sampah yang mendukung pengurangan volume sampah serta pemanfaatan kembali sampah yang masih bernilai. Dengan demikian, keberadaan TPS3R menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberadaan TPS3R menunjukkan bahwa pengelolaan sampah mulai diarahkan pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R), sehingga sampah tidak hanya dibuang tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam

---

<sup>95</sup> Arhamdi, "Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup."

pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kebersihan lingkungan, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya kenyamanan kawasan wisata, serta munculnya manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, hasil tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum rutinnya kegiatan kolaboratif, keterbatasan sarana pendukung, serta adanya sampah kiriman dari laut. Oleh karena itu, keberlanjutan pola kemitraan memerlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan edukasi masyarakat, serta pelaksanaan program kebersihan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.

## **2.2 Kendala dalam Pelaksanaan Kemitraan**

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak.

Meskipun pola kemitraan telah dibangun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup memengaruhi efektivitas program. Kendala yang paling menonjol adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Informan DLH menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah akan menjadi tidak maksimal jika salah satu unsur, khususnya masyarakat, tidak menjalankan perannya dengan baik. Warga juga mengakui bahwa yang aktif mengikuti kegiatan kebersihan hanyalah sebagian kecil masyarakat, sedangkan lainnya belum terlibat secara konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemitraan masih bertumpu pada kelompok-kelompok tertentu dan belum menjadi gerakan kolektif yang menyeluruh.

“

“Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta masih rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat.”<sup>96</sup>

Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa sampah yang ada di pantai bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas mereka, sehingga rasa tanggung jawab bersama belum terbentuk secara merata.

“ Ada juga yang merasa sampah itu datang dari laut, bukan dari warga sini, jadi mereka merasa tidak bertanggung jawab ”<sup>97</sup>

Dalam konteks teori fungsional, kendala ini menunjukkan belum optimalnya fungsi *adaptation* dan *latency*. Sistem sosial belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan dan membangun nilai kebersihan sebagai norma yang mengikat.

Kendala berikutnya adalah koordinasi antar pihak yang belum sepenuhnya jelas dan terstruktur. Beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa mereka sering hanya diminta ikut bersih-bersih, tetapi tidak mengetahui secara rinci bagaimana sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diangkut atau diolah. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi dan pembagian tugas. Dalam kemitraan yang ideal, setiap pihak seharusnya memahami fungsi masing-masing agar kerja sama dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Ketika pembagian peran tidak dipahami dengan baik, maka kerja sama cenderung hanya berjalan pada tataran kegiatan sesaat.

“Kami hanya diminta ikut bersih-bersih, tetapi kami tidak mengetahui secara rinci bagaimana sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diangkut dan diolah seperti apa.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

<sup>97</sup> Bapak Sudirman, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

<sup>98</sup> Ibu Andi Sri Utami, “Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae.”

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran juga menjadi hambatan yang cukup besar. DLH menyebutkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana, kurangnya fasilitas pendukung, dan belum optimalnya sarana yang tersedia untuk menunjang pengelolaan sampah. TPS3R pun masih berada pada tahap pengaktifan kembali sehingga belum mampu menjalankan fungsi secara penuh. Bahkan, sebagian fasilitas yang digunakan saat ini masih bergantung pada bantuan dari pihak luar seperti Pertamina. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pola kemitraan masih rentan jika tidak diikuti dukungan sarana dan pendanaan yang memadai.

Dengan demikian, dinamika pengelolaan sampah di Pantai Cempae mencerminkan proses sosial yang masih berada pada tahap transisi menuju sistem yang lebih mapan dan berkelanjutan.

### **2.3 Dampak Pengelolaan Sampah melalui Pola Kemitraan**

Dari sisi dampak, penerapan pola kemitraan memberikan perubahan positif terhadap kondisi kebersihan pantai. Volume sampah dapat dikurangi secara signifikan pada waktu tertentu, dan kawasan pantai menjadi lebih layak sebagai ruang publik dan destinasi wisata.

Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae memberikan dampak positif, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat sekitar. Dari sisi lingkungan, kegiatan bersih pantai secara kolaboratif mampu mengurangi timbunan sampah dan menjaga kebersihan pantai pada waktu tertentu.

“Kegiatan bersih pantai yang dilakukan secara kolaboratif mampu mengurangi tumpukan sampah dan menjaga kebersihan pantai pada waktu tertentu.”<sup>99</sup>

Dampak lain yang mulai terlihat adalah meningkatnya kesadaran sosial sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun belum menyeluruh,

---

<sup>99</sup> Arhamdi, “Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.”

kemitraan ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Warga mulai mengenali bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan akan berdampak langsung pada lingkungan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pola kemitraan berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme kerja teknis, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial yang secara perlahan membangun perubahan perilaku masyarakat.

Dari sisi ekonomi, pengelolaan sampah melalui kemitraan juga memberi dampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya pedagang dan pelaku UMKM. Warga menyampaikan bahwa pantai yang bersih membuat pengunjung lebih nyaman, sehingga jumlah pembeli di lapak-lapak sekitar juga meningkat. Selain itu, rencana pengembangan TPS3R seperti pemilahan sampah, budidaya magot, dan sistem barter sampah menunjukkan adanya potensi ekonomi baru dari pengelolaan sampah. Dengan demikian, dampak kemitraan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Namun demikian, dampak positif tersebut masih belum sepenuhnya stabil karena pelaksanaannya belum berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Selama kegiatan masih bergantung pada kerja bakti atau program sesaat, manfaat yang dirasakan masyarakat akan mudah hilang ketika kegiatan berhenti. Karena itu, dampak yang ada masih perlu diperkuat melalui sistem kerja yang lebih teratur, dukungan fasilitas yang cukup, serta keterlibatan masyarakat yang lebih konsisten.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons melalui skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) untuk memahami dinamika pengelolaan sampah melalui pola kemitraan yang terbentuk.

## **1. Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare**

Pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare merupakan salah satu bentuk upaya bersama dalam mengatasi persoalan lingkungan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa pola kemitraan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pembersihan sampah, tetapi juga menitikberatkan pada pembagian peran, koordinasi, komunikasi, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Kemitraan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kelurahan Cempae sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, TPS3R sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah, serta masyarakat sebagai pihak yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan pesisir. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan agar tujuan menjaga kebersihan lingkungan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator utama dalam merumuskan kebijakan, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pengangkutan sampah, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong terbangunnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam praktiknya, DLH tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan pemerintah kelurahan, TPS3R, serta kelompok masyarakat agar setiap program pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bentuk koordinasi tersebut menjadi salah

satu faktor yang menentukan keberhasilan pola kemitraan, karena setiap aktor memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Peran Pemerintah Kelurahan Cempae dalam pola kemitraan juga memiliki posisi yang strategis. Pemerintah kelurahan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai pelaksana utama di lapangan. Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah kelurahan berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, sosialisasi kebersihan lingkungan, maupun berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah di tingkat lokal dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat menjadi lebih mudah memahami tujuan program pengelolaan sampah serta terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kebersihan kawasan Tanggul Pantai Cempae.

Selain pemerintah, keberadaan TPS3R menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pola kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian, TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah berbasis prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Keberadaan TPS3R membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Dengan demikian, fungsi TPS3R tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam keberhasilan pola kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi masyarakat terlihat melalui kegiatan kerja

bakti, keterlibatan dalam pembersihan kawasan pantai, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata, adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pola kemitraan yang dibangun telah memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, pola kemitraan yang berlangsung di Tanggul Pantai Cempae menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antaraktor dalam menjalankan fungsi sosialnya. Parsons menjelaskan bahwa suatu sistem sosial akan berjalan secara efektif apabila mampu memenuhi empat fungsi utama yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Keempat fungsi tersebut tampak dalam praktik pengelolaan sampah di kawasan penelitian. Fungsi ***adaptation*** terlihat dari kemampuan pemerintah, TPS3R, dan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perkotaan pada umumnya. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah, pelaksanaan kegiatan pembersihan pantai secara berkala, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemampuan melakukan adaptasi menjadi syarat penting agar sistem pengelolaan sampah tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya volume sampah akibat aktivitas wisata maupun kiriman sampah dari luar kawasan.

Lebih lanjut, fungsi ***goal attainment*** dalam teori Talcott Parsons tercermin dari adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh pihak yang terlibat, yaitu menciptakan kawasan Tanggul Pantai Cempae yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga menjadi komitmen bersama pemerintah kelurahan, TPS3R, serta masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap aktor telah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan program pengelolaan sampah memiliki arah yang jelas. Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada penyusunan kebijakan, penyediaan sarana, dan pengawasan, pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, TPS3R menjalankan fungsi teknis dalam pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui berbagai kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada satu aktor, melainkan merupakan hasil dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Kejelasan tujuan tersebut juga memberikan dampak terhadap meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari semakin terkoordinasinya kegiatan pembersihan kawasan pantai, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta adanya upaya pengurangan volume sampah melalui kegiatan yang dilakukan TPS3R. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya sampah kiriman yang berasal dari wilayah lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pola kemitraan masih memerlukan penguatan koordinasi dan komitmen bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Fungsi **integration** menjadi aspek yang paling menonjol dalam hasil penelitian ini. Parsons menjelaskan bahwa integrasi merupakan kemampuan suatu sistem sosial dalam menjaga hubungan yang harmonis antar unsur yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, integrasi tercermin melalui koordinasi yang dibangun antara Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan Cempae, TPS3R, serta masyarakat. Hubungan tersebut tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan kegiatan pembersihan pantai, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

program pengelolaan sampah. Adanya komunikasi yang intensif antarpihak menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki kesadaran bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan pola kemitraan. Setiap permasalahan yang muncul diupayakan untuk diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak menghambat pelaksanaan program. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa integrasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adanya rasa saling percaya, saling membutuhkan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Menurut analisis peneliti, keberhasilan menjaga hubungan antarpihak inilah yang menjadi kekuatan utama pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae. Tanpa adanya integrasi yang baik, masing-masing aktor akan bekerja secara sendiri-sendiri sehingga efektivitas pengelolaan sampah akan sulit diwujudkan.

Selanjutnya, fungsi *latency* atau pemeliharaan pola terlihat melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah bersama TPS3R dan pemerintah kelurahan tidak hanya melaksanakan kegiatan pembersihan sampah, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Upaya tersebut bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif Parsons, pemeliharaan nilai dan norma merupakan syarat penting bagi keberlangsungan suatu sistem sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi investasi jangka panjang yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat fungsi AGIL saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adaptasi memungkinkan setiap aktor

menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, pencapaian tujuan memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program, integrasi menjaga hubungan antaraktor agar tetap harmonis, sedangkan pemeliharaan pola memastikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan tetap terjaga. Apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan sistem akan terganggu dan efektivitas pola kemitraan akan mengalami penurunan. Dengan demikian, teori Struktural Fungsional Talcott Parsons mampu menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan seluruh aktor dalam menjalankan fungsi sosialnya secara seimbang dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kemitraan dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan, TPS3R, dan masyarakat mampu menciptakan mekanisme kerja yang lebih efektif dibandingkan apabila pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki karakteristik yang berbeda karena objek penelitian berada di kawasan pesisir yang menghadapi tantangan berupa sampah kiriman dari laut. Kondisi tersebut menyebabkan pola kemitraan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sampah domestik, tetapi juga memerlukan kemampuan adaptasi terhadap faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis peneliti, pola kemitraan yang telah dibangun di Tanggul Pantai Cempae memberikan implikasi yang penting terhadap penguatan tata kelola lingkungan di Kota Parepare. Kemitraan tersebut membuktikan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun kebijakan, tetapi juga harus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan TPS3R, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pola kemitraan yang telah diterapkan tidak hanya memberikan manfaat terhadap peningkatan kebersihan kawasan pantai, tetapi juga memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Pola kemitraan yang terbangun dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi ataupun fasilitas yang dimiliki pemerintah, melainkan dipengaruhi oleh tingkat komitmen setiap aktor dalam menjalankan perannya secara konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kemitraan yang terjalin tidak bersifat hierarkis, tetapi lebih menekankan pada pembagian peran sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator, Pemerintah Kelurahan memperkuat koordinasi di tingkat lokal, TPS3R melaksanakan fungsi operasional dalam pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya berbagai program yang telah dirancang. Pembagian peran tersebut mencerminkan bahwa setiap unsur dalam sistem memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga tidak terdapat pihak yang dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan pihak lainnya.

Temuan tersebut semakin mempertegas pandangan Talcott Parsons yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu subsistem tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka akan memengaruhi keseimbangan sistem secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, misalnya, apabila masyarakat tidak berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan TPS3R akan menjadi kurang efektif. Sebaliknya, apabila pemerintah

tidak menyediakan dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan pembinaan, maka partisipasi masyarakat juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah merupakan hasil dari hubungan timbal balik antaraktor yang saling mendukung untuk mempertahankan stabilitas sistem pengelolaan lingkungan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola kemitraan yang telah dibangun memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap kawasan Tanggul Pantai Cempae. Masyarakat tidak lagi memandang kebersihan pantai sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi mulai memahami bahwa kebersihan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Kesadaran tersebut tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, partisipasi pada kegiatan pembersihan pantai, serta dukungan terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan TPS3R. Menurut analisis peneliti, perubahan cara pandang masyarakat tersebut merupakan indikator penting bahwa pola kemitraan yang diterapkan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik berupa lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menghasilkan perubahan sosial berupa meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola kemitraan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu kendala yang masih sering dihadapi adalah belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya pengelolaan sampah sehingga perilaku membuang sampah sembarangan masih ditemukan dalam kondisi tertentu. Selain itu, karakteristik kawasan pesisir menyebabkan adanya sampah kiriman yang terbawa arus laut maupun sungai sehingga volume sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae tidak sepenuhnya berasal dari aktivitas masyarakat setempat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan koordinasi yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat kelurahan maupun

kota, tetapi juga melibatkan wilayah lain yang menjadi sumber masuknya sampah ke kawasan pesisir.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pola kemitraan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan fasilitas pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan di lapangan masih memerlukan peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas fasilitas pengelolaan sampah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, keberlanjutan pola kemitraan harus diikuti dengan penguatan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas TPS3R, serta penyediaan sarana yang memadai agar seluruh proses pengelolaan sampah dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Apabila ditinjau dari perspektif Administrasi Publik, pola kemitraan yang diterapkan di Tanggul Pantai Cempae mencerminkan penerapan prinsip *collaborative governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian masalah publik. Permasalahan sampah merupakan persoalan yang kompleks sehingga penyelesaiannya tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, lembaga lokal, serta kelompok pengelola seperti TPS3R menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kemitraan bukan sekadar bentuk kerja sama formal, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme kolaborasi yang mampu memperkuat efektivitas pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan yang telah dicapai bukan semata-mata disebabkan oleh adanya kebijakan

pemerintah, tetapi merupakan hasil dari sinergi antaraktor yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* telah berjalan secara relatif seimbang sehingga mampu menciptakan stabilitas dalam sistem pengelolaan sampah. Namun demikian, keseimbangan tersebut harus terus dipertahankan melalui penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas TPS3R, serta komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah. Dengan demikian, pola kemitraan yang telah dibangun tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan di Tanggul Pantai Cempae, tetapi juga menjadi model kolaborasi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan pada kawasan pesisir lainnya di Kota Parepare maupun daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pola kemitraan tidak hanya diukur dari terlaksananya berbagai program pengelolaan sampah, tetapi juga dari kemampuan seluruh aktor dalam membangun hubungan kerja yang berkelanjutan, saling memperkuat, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis mengenai hasil yang telah dicapai melalui penerapan pola kemitraan tersebut, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun kelembagaan, sebagai indikator keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare.

## **2. Analisis Hasil atau Dampak Pengelolaan Sampah Melalui Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare**

Pengelolaan sampah melalui pola kemitraan yang diterapkan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare memberikan berbagai dampak positif, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi maupun kelembagaan. Dampak tersebut merupakan hasil

dari keterlibatan berbagai pihak yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara bersama-sama dalam upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dampak yang paling terlihat adalah terjadinya perubahan kondisi lingkungan di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Sebelum adanya berbagai kegiatan kolaboratif dalam pengelolaan sampah, kawasan pesisir sering dipenuhi oleh sampah plastik, kayu, dan berbagai jenis sampah lainnya yang terbawa arus laut maupun berasal dari aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi estetika kawasan pantai, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, melalui kegiatan pembersihan rutin, pengangkutan sampah, penyediaan fasilitas kebersihan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, kondisi kawasan Tanggul Pantai Cempae secara bertahap mengalami perbaikan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dibangun telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan pesisir. Kawasan pantai menjadi lebih bersih, nyaman, dan layak dimanfaatkan sebagai ruang publik maupun kawasan wisata. Kondisi lingkungan yang semakin baik juga berpotensi mendukung keberlanjutan fungsi ekologis kawasan pesisir sebagai habitat berbagai biota laut serta sebagai pelindung alami wilayah pantai dari ancaman kerusakan lingkungan.

Selain memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, pola kemitraan juga berpengaruh terhadap aspek sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara pemerintah, TPS3R, dan masyarakat telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, aksi bersih pantai, serta berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik berupa lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mampu membentuk perilaku sosial yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai kebersihan yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan.

Dampak lainnya yang juga dapat dirasakan adalah meningkatnya solidaritas sosial di antara masyarakat. Kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan kolaborasi dalam membersihkan kawasan pantai telah memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat maupun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi media untuk membangun kebersamaan, rasa tanggung jawab kolektif, serta memperkuat modal sosial masyarakat pesisir.

Dari aspek ekonomi, keberadaan TPS3R dan pengelolaan sampah berbasis prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak memiliki manfaat dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pemilahan dan pengolahan sehingga memiliki nilai ekonomi tertentu. Walaupun manfaat ekonomi tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat, keberadaan TPS3R menunjukkan adanya peluang pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, kondisi kawasan pantai yang lebih bersih juga dapat meningkatkan daya tarik wisata Tanggul Pantai Cempae. Kawasan wisata yang bersih dan nyaman akan memberikan kesan positif bagi pengunjung sehingga berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan. Peningkatan aktivitas wisata pada akhirnya dapat memberikan dampak

ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berkembangnya usaha kecil, perdagangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Dari aspek kelembagaan, pola kemitraan yang telah dibangun menunjukkan adanya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan Cempae, TPS3R, serta masyarakat mulai memiliki mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Penguatan kelembagaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program karena memungkinkan setiap aktor untuk menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, hasil pengelolaan sampah melalui pola kemitraan menunjukkan bahwa fungsi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* telah menghasilkan berbagai perubahan positif dalam sistem sosial masyarakat pesisir. Fungsi adaptasi memungkinkan masyarakat dan lembaga terkait untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang rentan terhadap pencemaran. Fungsi pencapaian tujuan berhasil diwujudkan melalui terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Fungsi integrasi tercermin dari semakin kuatnya hubungan kerja sama antaraktor, sedangkan fungsi pemeliharaan pola terlihat dari terbentuknya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui pola kemitraan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta keberadaan sampah kiriman dari wilayah lain yang masih menjadi persoalan utama di kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi lingkungan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar

manfaat dari pola kemitraan tersebut dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi ekonomi berbasis lingkungan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan strategi yang relevan dan efektif dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah di kawasan pesisir yang memiliki karakteristik sosial dan ekologis yang kompleks.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Dinamika Pengelolaan Sampah Melalui Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare**, serta hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. **Pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae telah melibatkan berbagai aktor**, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kelurahan, pengelola TPS3R, masyarakat, komunitas lingkungan, serta unsur pendukung lainnya. Masing-masing pihak menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. DLH berperan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengangkutan sampah, kegiatan bersih pantai, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan, penyampaian informasi, serta mendorong partisipasi warga dalam memanfaatkan TPS3R. Pengelola TPS3R menjalankan fungsi pemilahan dan pengolahan sampah agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomis, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana utama dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui partisipasi pada kegiatan kebersihan serta pengelolaan sampah dari sumbernya. Pola kemitraan tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama antarpemangku kepentingan yang saling melengkapi meskipun koordinasi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. **Hasil pengelolaan sampah melalui pola kemitraan menunjukkan dampak yang positif, namun belum optimal dan berkelanjutan.** Dampak positif

tersebut terlihat dari meningkatnya kebersihan kawasan Pantai Cempae setelah pelaksanaan kegiatan bersih pantai, meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mulai berfungsinya kembali TPS3R sebagai sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta munculnya manfaat ekonomi berupa meningkatnya kenyamanan pengunjung dan aktivitas UMKM di sekitar kawasan pantai. Akan tetapi, efektivitas pola kemitraan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, terbatasnya sarana pendukung, belum optimalnya koordinasi antarpihak, serta adanya sampah kiriman dari laut yang menyebabkan kebersihan pantai sulit dipertahankan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan edukasi masyarakat, optimalisasi peran TPS3R, serta komitmen seluruh mitra menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Tanggul Pantai Cempae.

Berdasarkan perspektif **Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang saling bergantung. Keberhasilan pola kemitraan ditentukan oleh kemampuan setiap aktor menjalankan fungsi masing-masing secara terpadu. Ketika koordinasi, partisipasi, dan pembagian peran berjalan dengan baik, sistem pengelolaan sampah mampu menghasilkan kondisi lingkungan yang lebih bersih, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka efektivitas pengelolaan sampah akan menurun sehingga tujuan bersama untuk menciptakan kawasan Pantai Cempae yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan belum dapat tercapai secara maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika pengelolaan sampah melalui pola kemitraan di Tanggul Pantai Cempae Kota Parepare, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut, yaitu sebagai berikut.

### **1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare**

Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan seluruh mitra yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae. Selain mempertahankan program bersih pantai yang telah berjalan, DLH juga perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat sampah terpilah, alat pengangkutan, serta fasilitas pendukung lainnya, perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

### **2. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pengelola TPS3R**

Pemerintah kelurahan bersama pengelola TPS3R diharapkan mampu memperkuat pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, gotong royong, dan pendampingan secara berkala. Pengelolaan TPS3R juga perlu dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengembangan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, TPS3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat

pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

### 3. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kawasan Pantai Cempae dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas. Keberhasilan pola kemitraan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan kawasan pantai yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

### 4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada dinamika pola kemitraan dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya menelaah efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pesisir, keberlanjutan program TPS3R, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, atau membandingkan pola kemitraan pengelolaan sampah di kawasan pesisir lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ' Isril, Rury Febrina, dan Zulfa Harirah, "Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17.1 (2019), hal. 60, doi:10.35967/jipn.v17i1.7059
- Ambroise Brenier, "Cara Indonesia Memerangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut Dari Sumbernya di Darat," *WORLDBANK.ORG*, 2023
- Apriani, Gradila, "Implementasi Pengelolaan Sampah," *Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022
- Arhamdi, S.Si. M.Si, "Kepala Dinas Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup" (Wawancara Pribadi, 05 Desember, 2025)
- Bahodopi, Pemerintah Kecamatan, dan Bahodopi District Government, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi," 1.2 (2025), hal. 41–57
- Baloq, Loang, "Jannah dkk\_2024\_Hambatan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Loang Baloq," 4.1 (2024), hal. 89–94
- Bapak Sudirman, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae" (Wawancara Pribadi, 09 Desember, 2025)
- "Collaborative governance," 2019
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, et al., "Landasan Teori Struktural Fungsional Talcott Person," 2021, hal. 167–86
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (kencana, 2013)
- Fiya, Aisyah Nur Ash, "Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat," doi:[https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan\\_Prinsip\\_Hukum\\_Lingkungan\\_dalam/LJBUEAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Prinsip_Hukum_Lingkungan_dalam/LJBUEAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).
- Ibu Andi Sri Utami, "Warga/Masyarakat Tanggul Pantai Cempae" (Wawancara Pribadi, 09 Desember, 2025)
- Ilmiah, Jurnal, Multidisiplin Terpadu, Denisa Rahma Putri, Nathanael Ferdinandus,

- Auzan Wafi, dan Universitas Tarumanagara, “Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali : Mengapa Bisa Terjadi ? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya ?,” 8.6 (2024), Hal. 2032–41
- Joesyiana, Kiki, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda),” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6.2 (2018), hal. hal 94
- Jurnal Ilmiah et al., “Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia Yang Tidak Terkendali: Mengapa Bisa Terjadi? Apa Dampaknya Dan Bagaimana Cara Mengatasinya?,” *Jurnal Lingkungan*, Vol. 8 No. (2024)
- “Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari Vol 3 No 1 , Agustus 2025 Hal 83-91 Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Analysis Of The Suitability Of The Cempae Beach Tourism Area , Soreang District , Parepare City 13.1 (2025), Hal. 83–91
- Kelautan, Program Studi Ilmu, “Analisis Kesesuaian Kawasan Wisata Pantai Cempae Kota Parepare,” 2025
- Kementrian PUPR, “Direktorat Jendral Cipta Karya,Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman,” *Buku Petunjuk Teknis TPS 3R , Tempat Pengelolaan Sampah 3R*, 2.4 (2017), hal. 1–152
- Kesehatan, Terhadap, dan D A N Lingkungan, “BAHAYA PLASTIK,” 03.1
- Kompasiana, “pantai tanggul cempae di soroti penuh dengan sampah” <<https://www.kompasiana.com/mulriadi/6473cfb508a8b57f92515932/pantai-tanggul-cempae-disoroti-penuh-dengan-sampah>>
- Kopioru, Charles, “analisis kebijakan kemitraan kelola sampah antara pemerintah daerah dengan pihak swasta di kota kupang,” *inovasi kebijakan*, 7 No.1 (2022) <<https://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/JIK/article/view/88>>
- Lingkungan, Menteri, Hidup Dan, dan Kehutanan Republik, “Portal SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), 2024,” 2022
- Lisa, Fasihul, Chesa Fabita, Maulivi Rahmadini, Moh Musleh, dan M Husni Tamrin, “Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Jambangan Kota Surabaya,” *Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia*, 10.1 (2024), hal. 37–56

<<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/13071>>

Muh.Ridwan, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar*, 2024

Mulyadi, Mohammad, “Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya,” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol.15.1 (2011)

Mulyani, “Ketua RT.03 Sentral” (Wawancara Pribadi, 12 Mei, 2026)

Nabila, Haura, dan Arif Rahman Hakim, “Banua Seribu Ayunan : Tradisi Baayun Maulid Sebagai Wisata Religi Berkelanjutan di Masjid Keramat Banua Halat,” *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, 3.1 (2025), hal. 1–14

Nahrudin, Zulfan, “Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar,” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9.1 (2016), hal. 11–20, doi:<https://doi.org/10.31947/jgov.v9i1.231>

Nugraha, Aditya, Surjono H. Sutjahjo, dan Akhmad Arif Amin, “Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan,” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8.1 (2018), hal. 7–14, doi:10.29244/jpsl.8.1.7-14

Nurfadhillah, Annisya, Rita Rahmawati, Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Magister Administrasi Publik, dan Universitas Djuanda, “Analisis ketidakefektifan pengelolaan sampah di kabupaten bogor melalui lensa teori struktural fungsionalisme,” 7.April (2024), hal. 49–62

Prasada, Ivanka Angelina Dheyanita, Ketut Sedana Arta, dan I Wayan Putra Yasa, “Klenteng Su San Yee di Kelurahan Banjar Jawa, Buleleng, Bali (Sejarah dan Strukturnya sebagai Potensi Media Pendidikan Multikultur),” *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10.2 (2022), hal. 14–27, doi:10.23887/jjps.v10i2.42277

Purap, Gregorius Pain, “Institut Teknologi Nasional,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2021), hal. 49–58

Rifai, Muhamad Khafid, Hartati Kartikaningsih, dan Agus Susilo, “Optimalisasi Reduksi Sampah dengan Keterlibatan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Perkotaan di TPS-3R Janti Berseri Waru-Sidoarjo,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22.6 (2024), hal. 1562–72, doi:10.14710/jil.22.6.1562-1572

- Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqin Nur, “Metode pengumpulan data melalui wawancara,” *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 2023, hal. 1–89
- Rizky, Sri Afnitawaty, Alfian Prayoga Saputra, dan Asropi, “Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24.1 (2024), hal. 12–29, doi:<https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274>
- Saiaran Pers, “Pemerintah Siapkan 5 Strategi Penanganan Sampah Laut,” *kementrian lingkungan hidup dan kehutanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi*, 2019
- Sembiring, Tamaulina Br., “pengelolaan lingkungan hidup (kosep dan teori),” 2022, doi:[https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Konsep\\_dan/du9bEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_Konsep_dan/du9bEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).
- Sirajudin, F F, “Evaluasi Program Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bank Sampah Induk Patriot Bekasi di Kecamatan Mustikajaya ...,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, hal. 12 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67642%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67642/1/FAWAZ\\_FUHAEDI\\_SIRAJUDIN-FDK.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67642%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67642/1/FAWAZ_FUHAEDI_SIRAJUDIN-FDK.Pdf)>
- Sri Afnitawaty Rizky, Alfian Prayoga Saputra, dan Asropi, “Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan, Jurnal Penelitian Pendidikan,” 24 No. 1 (2024)
- Studi, Program, Perencanaan Wilayah, D A N Kota, Fakultas Teknik, dan Universitas Bosowa Makassar, “Arahan Pengelolaan Persampahan Di Kota Pare-Pare ( Studi Kasus : Kecamatan Bacukiki Barat ) Skripsi,” 2023
- Susanti, Dhayu, “Peran Penghayat Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Dalam Melestarikan Tradisi Suran Di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk,” *Theses IAIN Kediri*, 2022, hal. 29 <<https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/6369>>
- syahputra eko, novianty lily, sembiring juhardi, “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone,” *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023), hal. 35–45
- Tahir, Muh., “Anggota TPS3R” (Wawancara Pribadi, 09 Mei, 2026)
- Thamrin, Hazairin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim, “Evaluasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo Evaluation of Waste Management in City of Gorontalo,” *Jambura Edu Biosfer Journal*, 4.1 (2022), hal. 2656–0526

Tohir, Muhammad, “pantai tanggul cemape penuh sampah, DLH Parepare: anggota secepatnya turun,” 2023 <<https://www.pijarnews.com/pantai-tanggul-cemape-penuh-sampah-dlh-parepare-anggota-secepatnya-turun/>>

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2008, hal. 1–46

Wardhani, P P, “Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis Tps 3r Di Desa Bergas Kidul),” *Journal of Politic and Government Studies*, 9.2 (2020), hal. 81–90, doi:[ejournal.undip.ac.id](https://ejournal.undip.ac.id)

Yanti, Seri, “Implementasi Program 3R (Reduce, Reuce, Dan Recycle) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di TPS3R Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang,” 2016, hal. 1–23

Yuliana, “Ketua RT.O3 Sentral” (Wawancara Pribadi, 08 Mei, 2026)

Zulkarnain, Febri, “Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar,” *Universitas Hasnuddin*, 2018, hal. 121, doi:[core.ac.uk](https://core.ac.uk)

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24494  
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: media@iainpare.ac.id

Nomor: B-1785/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

4 September 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Abd. Wahidin, M.Si.
2. Abd. Rasyid, M.Si.

Di-  
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a       | : ERINA PUTRI PURNAMA AMIR                                                                         |
| NIM           | : 2020203869201007                                                                                 |
| Program Studi | : Sosiologi Agama                                                                                  |
| Judul Skripsi | : DINAMIKA KOLABORASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH DI TANGGUL PANTAI CEMPAE |

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,

Dr. A. Khodam, M.Hum  
 NIP. 19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2523/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2025

11 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama                     | : ERINA PUTRI PURNAMA AMIR                      |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : BULUKUMBA, 25 Juli 2002                       |
| NIM                      | : 2020203869201007                              |
| Fakultas / Program Studi | : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama |
| Semester                 | : XI (Sebelas)                                  |
| Alamat                   | : JL.GANGGAWA NO.23A KEC. UJUNG KOTA PAREPARE   |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**DINAMIKA PENANGANAN SAMPAH POLA KEMITRAAN DI TANGGUL PANTAI CEMPAE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000875



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 875/IP/DPM-PTSP/11/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **ERINA PUTRI PURNAMA AMIR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **SOSIOLOGI AGAMA**

ALAMAT : **JL. GANGGAWA NO.23A PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :  
JUDUL PENELITIAN : **DINAMIKA PENANGANAN SAMPAH POLA KEMITRAAN DI TANGGUL PANTAI CEMPAE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE**

WAKTU PENELITIAN : **17 November 2025 s.d 11 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **18 November 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Telp. (0421) 23949  
Kode Pos 91132, Email : [dlh@pareparekota.go.id](mailto:dlh@pareparekota.go.id)

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 600.4/ 10 / DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : YOSEP LOBO S.STP  
NIP : 19840907 200212 1 002  
PANGKAT/ GOLONGAN : PEMBINA TK. I, IV/b  
JABATAN : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

N A M A : ERINA PUTRI PURNAMA AMIR  
UNIVERSITAS/LEMBAGA: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
JURUSAN : SOSIOLOGI AGAMA  
ALAMAT : JL. GANGGAWA NO. 23A, KOTA PAREPARE.

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sesuai dengan surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 875/IP/DPM-PTSP/11/2025 tanggal 18 November 2025 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian: "DINAMIKA PENGELOLAAN SAMPAH POLA KEMITRAAN DI TANGGUL PANTAI CEMPAE"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2026

an. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PAREPARE



YOSEP LOBO S.STP

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19840907 200212 1 002

## Pedoman Observasi Penelitian

Judul Penelitian: Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae

Tujuan Umum Observasi: Mengamati secara langsung kondisi lingkungan, aktivitas pengelolaan sampah, serta interaksi dan kemitraan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae.

Identitas Lokasi Observasi

- Nama Lokasi: Tanggul Pantai Cempae
- Tanggal Observasi: 22 Desember 2025
- Waktu Observasi: 10.00 WITA

### A. Kondisi Kebersihan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah

| Aspek yang Diamati                        | Indikator Observasi                                            | Hasil Observasi                                                                                                                                                                                                                          | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kebersihan area pantai                    | Jumlah sampah yang terlibat, jenis sampah (organi/non organik) | Masih ada sampah yang terlihat khususnya sampah organik seperti plastik                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar pantai cempae, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Pemerintah daerah, Camat, Lurah, BUMN, Kelompok Masyarakat.</li> <li>- Diperlukan adanya perubahan paradigma masyarakat di sekitar pantai cempae untuk tidak membuang sampah khususnya sampah plastik di sekitar Pantai Cempae</li> </ul> |
| Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah | Ada atau tidaknya TPS3R, tempat sampah, papan edukasi          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 1 Unit TPS3R, yakni TPS3R Lakessi</li> <li>• Terdapat tempat sampah krisbow di sekitar anjungan cempae</li> <li>• Tersapat 4 unit kontainer sampah di sekitar Pasar Lakessi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain TPS3R, diperlukan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar Pantai Cempae</li> <li>- Sampai saat ini, belum ada Bank Sampah yang terbentuk di Kelurahan Watang Soreang.</li> <li>- Pengelolaan Bank Sampah hanya terdapat di Kelurahan Lakessi</li> </ul>                                                                          |

|                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat himbauan untuk tidak membuang sampah di Laut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kondisi fasilitas | Bersih, rusak, terawat, lengkap | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas yang terdapat pada TPS3R Lakessi adalah 2 unit Mesin Cacah Organik dalam kondisi baik dan berfungsi, 2 unit mesin pengayak dalam kondisi baik dan berfungsi serta sarana dan prasanaa pengelolaan sampah lainnya</li> <li>• Terdapat Fasilitas Mesin Pencacah anorganik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran operasional dan pemeliharaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di TPS3R dianggarkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare</li> <li>- Mesin cacah anorganik merupakan bantuan dari PT. Pertamina Patra Niaga Fuel yang dianggarkan melalui anggaran CSR Perusahaan</li> <li>- Pada TPS3R Lakessi pernah terdapat pemanfaatan sampah dengan maggot, tetapi maggot tersebut tidak dapat berkembang biak yang diakibatkan oleh faktor dan pengaruh cuaca.</li> </ul> |

#### B. Aktivitas Pengelolaan Sampah dan Partisipasi Masyarakat

| Aspek yang Diamati                      | Indikator Observasi                                      | Hasil Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan kegiatan pembersihan pantai | Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, metode yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Pembersihan Pantai biasanya dilaksanakan untuk memperingati :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari</li> <li>- Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni</li> <li>- World Clean Up Day setiap tanggal 09 September</li> </ul> </li> <li>Kegiatan tersebut biasanya dihadiri oleh Pemerintah Kota (SKPD, Camat dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampah yang terkumpul dari kegiatan aksi bersih pantai biasanya diangkut langsung ke TPA dengan menggunakan armada sampah Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- PT. Pertamina Patra Niaga Fuel pernah menawarkan aksi bersih pantai khususnya sampah plastik, di mana sampah plastik yang terkumpul akan dibeli oleh Pertamina untuk diolah dan dimanfaatkan pada TPS3R, tetapi hal tersebut belum pernah terwujud sampai sekarang.</li> <li>- Diperlukan pengadaan sarana dan prasarana berupa perahu sampah yang bisa melakukan pembersihan</li> </ul> |

|  |  |                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | sampah lakessi untuk selanjutnya diolah menjadi paving blok dan pot bunga |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|

### C. Peran dan Interaksi Pihak dalam Pola Kemitraan

| Aspek                                           | Indikator Observasi                                           | Hasil Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehadiran DLH, TNI, LSM, swasta, dan masyarakat | Pertisipasi aktif, koordinasi, komunikasi antar pihak         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap kegiatan aksi bersih yang dilakukan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah (SKPD, Camat dan Lurah), BUMN, swasta dan kelompok pegiat lingkungan</li> <li>Kegiatan pengelolaan sampah pada TPS3R dan bank sampah lakessi melibatkan DLH, PT. Pertamina Patra Niaga dan masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini, sementara dalam proses pembentukan Bank Sampah Induk di TPS3R Lakessi, di mana Bank Sampah Induk tersebut nantinya akan mengelola sampah dari masyarakat yang berdomisili di 6 Kelurahan di Kecamatan Soreang, di mana penganggaranbnya akan bersumber dari anggaran CSR PT. Pertamina Patra Niaga Fuel.</li> <li>Pengurus Bank Sampah Induk di Lakessi akan direkrut dari pengelola Bank sampah yang ada di Kecamatan Soreang</li> </ul> |
| Bentuk kemitraan                                | Kesepakatan kerja sama, dukungan sumber daya, pembagian tugas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pola kemitraan yang akan dilakukan adalah berupa kegiatan optimalisasi Bank Sampah Induk yang diinisiasi oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel dan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Pengelolaan Bank Sampah Induk akan ,mendapatkan dukungan sumber daya dari Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini, sementara dalam proses pembentukan Bank Sampah Induk di TPS3R Lakessi, di mana Bank Sampah Induk tersebut nantinya akan mengelola sampah dari masyarakat yang berdomisili di 6 Kelurahan di Kecamatan Soreang, di mana penganggaranbnya akan bersumber dari anggaran CSR PT. Pertamina Patra Niaga Fuel.</li> <li>Pengurus Bank Sampah Induk di Lakessi akan direkrut dari pengelola</li> </ul>                                           |

|                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                            | Lurah), BUMN, pihak swasta, masyarakat, kelompok pegiat lingkungan, Ikatan Duta Lingkungan Hidup dan TNI /POLRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | langsung pada wilayah pantai khususnya pantai cemape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Partisipasi masyarakat      | Tingkat keterlibatan warga sekitar dan kelompok lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan warga sekitar terhadap kegiatan aksi bersih pantai masih dianggap kurang optimal sedangkan keterlibatan kelompok / pegiat lingkungan dapat dianggap sudah maksimal dan bahkan terlibat secara langsung pada setiap momen kegiatan aksi bersih pantai yang dilakukan</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan paradigma masyarakat untuk dapat terlibat langsung melalui setiap kegiatan aksi bersih yang dilakukan</li> <li>Diperlukan adanya tanggung jawab dan peran serta masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah ke Pantai dan malah sebaliknya senantiasa menjaga kondisi kebersihan pantai Cempae.</li> </ul> |
| Pengelolaan sampah di TPS3R | Proses pemilahan, penimbangan, dan penyimpanan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada TPS3R adalah :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan sampah yang bersumber dari sisa sayuran dan buah – buahan dari Pasar Lakessi untuk diolah menjadi kompos.</li> <li>Pemanfaatan sampah anorganik yang bersumber dari sampah yang terkumpul pada bank</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Metode Pengkomposan yang dilakukan adalah metode open windrow dan metode takakura</li> <li>Metode pemanfaatan sampah anorganik yang dilakukan masih menggunakan metode konvensional melalui pembakaran sampah plastik secara langsung.</li> </ul>                                                                                                                   |

|                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                       | dan pengurus bank sampah di kecamatan Soreang sedangkan dukungan finansial akan disupport langsung oleh PT. Pertamina Patra Niaga Fuel melalui alokasi anggaran CSR                                                                                                                                                                | Bank sampah yang ada di Kecamatan Soreang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hambatan dan solusi | Masalah yang muncul dan penanganannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan dalam pengelolaan Bank Sampah Induk biasanya terkait dengan pemasaran sampah yang terkumpul dari nasabah.</li> <li>Permasalahan pengelolaan TPS3R adalah terkait dengan ketersediaan alokasi anggaran dan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan komunikasi awal dengan pengelola sampah yang ada di Kabupaten Maros dan Kota Makassar</li> <li>Diupayakan sampah yang terkumpul pada Bank Sampah dapat dikirim langsung ke pengepul / Industri daur ulang di Luar Sulawesi</li> <li>Kompos yang dihasilkan pada TPS3R masih dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan karena belum ada regulai yang mengatur</li> </ul> |

#### D. Dampak dan Persepsi Masyarakat

| Aspek                        | Indikator Observasi                                         | Hasil Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan kondisi lingkungan | Kebersihan setelah kegiatan, keluhan atau pujian masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi kebersihan pantai setelah dilakukan aksi bersih mengalami perubahan yang ditandai dengan berkurangnya sampah plastik yang diambil di sekitar pantai Cempae</li> <li>Kondisi tersebut tidak akan bertahan lama yang diakibatkan oleh :               <ol style="list-style-type: none"> <li>masih ada beberapa</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan adanya partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi kebersihan pantai cempae dengan tidak membuang sampah secara sembarangan ke pantai.</li> </ul> |

|                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | <p>masyarakat yang biasa membuang sampah langsung ke Pantai</p> <p>2. Kondisi Teluk Parepare yang menyebabkan sampah yang masuk dan terbuang ke Teluk tidak akan pernah keluar dan akan berkumpul di sekitar anjungan pantai cempae</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kesadaran dan partisipasi masyarakat | Respon terhadap edukasi dan kegiatan pengelolaan sampah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sampah masih minim dan dianggap masih kurang, ini dapat terlihat dari minimnya warga masyarakat yang menjadi nasabah pada Bank Sampah</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan adanya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam mengubah pola pikir, pola sikap dan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah</li> </ul>   |
| Harapan dan evaluasi                 | Umpan balik dan rekomendasi untuk keberlanjutan pola kemitraan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola kemitraan yang selama ini telah dilakukan dengan BUMN seperti PT. Pertamina Patra Niaga diupayakan akan terus berlanjut.</li> <li>• Pola kemitraan yang selama ini telah dilakukan dengan swasta, masyarakat dan kelompok kegiatan lingkungan diharapkan dapat terus berlanjut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola kemitraan merupakan salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan dalam melakukan pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan sampah pada Pantai Cempae dan sekitarnya</li> <li>- Pola kemitraan dalam pengelolaan</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | sampah tidak akan pernah berlanjut dan berhasil tanpa pelibatan semua stake holder terkait seperti Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, masyarakat dan kelompok pegiat lingkungan |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Catatan Lapangan (Observasi Non-Verbal & Konteks Sosial)**

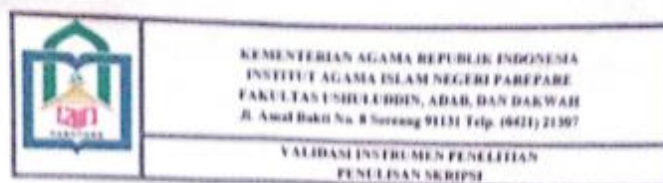
Catatan ini mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, hubungan antar subjek, suasana lingkungan, dan hal-hal tidak terduga yang mendukung atau bertentangan dengan jawaban wawancara.

.....

.....

.....





NAMA MAHASISWA : ERINA PUTRI PURNAMA AMIR  
NIM : 2020203869201007  
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
PRODI : SOSIOLOGI AGAMA  
JUDUL : Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### INFORMAN: PEJABAT / PETUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

Kode Responden :

Nama (Inisial) :

Jenis Kelamin :

Usia :

Lama Tinggal / Lama Bertugas :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

##### A. Pola Kemitraan

1. Bagaimana DLH memandang kondisi sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae saat ini, dan seperti apa peran, tugas, serta fungsi DLH dalam pengelolaan sampah di kawasan tersebut?
2. Siapa saja pihak yang terlibat atau bekerja sama dengan DLH (misalnya TNI, masyarakat, komunitas lingkungan, sektor swasta), dan bagaimana bentuk serta mekanisme kerja sama atau koordinasi yang terjalin di antara unsur-unsur tersebut?
3. Apakah DLH memiliki program khusus atau kegiatan rutin di Cempae seperti bersih pantai, edukasi masyarakat, atau pengelolaan bank sampah?

4. Menurut DLH, bagaimana dampaknya jika salah satu unsur kemitraan tidak menjalankan perannya dalam sistem pengelolaan sampah di kawasan pantai?

**B. Dinamika & Kendala**

5. Apa saja kendala utama yang dihadapi DLH dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan sampah di Cempoe (misalnya terkait dana, partisipasi masyarakat, fasilitas, atau kebijakan), dan bagaimana upaya DLH dalam mengatasi kendala atau konflik antar pihak yang muncul?
6. Bagaimana keterlibatan sektor swasta atau TPS3R dalam mendukung pengelolaan sampah di kawasan tersebut?

**C. Hasil & Evaluasi**

7. Bagaimana hasil nyata dari pola kemitraan ini terhadap kebersihan pantai Cempoe dan peningkatan kesadaran masyarakat?
8. Apa hal-hal yang masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemitraan antara DLH dan masyarakat ke depan?



### INFORMAN: MASYARAKAT SEKITAR TANGGUL PANTAI CEMPAE

Kode Responden :

Nama (Inisial) :

Jenis Kelamin :

Usia :

Lama Tinggal / Lama Bertugas :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

#### A. Persepsi & Partisipasi

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kondisi kebersihan di Pantai Cempae saat ini?
2. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam kegiatan pembersihan sampah di pantai, dan sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak lain dalam menangani sampah di kawasan ini?

#### B. Kendala & Dinamika Sosial

4. Apa saja kendala yang membuat masyarakat belum maksimal dalam menjaga kebersihan pantai?
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kegiatan atau program kebersihan dari DLH dan komunitas lingkungan?
6. Apakah ada komunikasi atau pembagian peran yang jelas antara warga dan pemerintah dalam kegiatan kebersihan pantai?

#### C. Dampak & Harapan

7. Apakah kerja sama pengelolaan sampah ini membawa perubahan bagi kebersihan, kenyamanan, atau ekonomi masyarakat sekitar?
8. Apa harapan Bapak/Ibu agar kegiatan kebersihan di Pantai Cempae dapat terus berlanjut dan lebih efektif ke depannya?

PAREPARE

**INFORMAN: PENGELOLA / ANGGOTA TPS3R ATAU BANK SAMPAH  
LAKESI**

Kode Responden :  
 Nama (Initial) :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Lama Tinggal / Lama Bertugas :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Tanggal Wawancara :

**A. Operasional & Kemitraan**

1. Bagaimana sistem kerja dan peran TPS3R/Bank Sampah Cempae dalam pengelolaan sampah di kawasan tersebut?
2. Dari mana sumber sampah yang dikelola, dan siapa saja pihak yang terlibat atau mendukung kegiatan ini (misalnya DLH, masyarakat, LSM, atau swasta)?
3. Bagaimana bentuk kerja sama dan dukungan yang diterima, termasuk pelatihan atau bantuan dari pemerintah?

**B. Tantangan & Solusi**

4. Apa kesulitan utama dalam pengelolaan sampah di wilayah Cempae, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam memilah atau menyortir sampah ke TPS3R?
5. Apakah kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar?

**C. Dampak & Harapan**

6. Bagaimana pengaruh kegiatan TPS3R terhadap kebersihan pantai dan lingkungan sekitar?
7. Apa harapan Anda untuk keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis kemitraan ini ke depan?

**PAREPARE**

**INFORMAN: PEJABAT / PETUGAS PEMERINTAH KELURAHAN  
LAKESSI**

Kode Responden :

Nama (Inisial) :

Jenis Kelamin :

Usia :

Lama Tinggal / Lama Bertugas :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

**A. Pola Kemitraan**

1. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae saat ini, dan bagaimana peran kelurahan dalam pengelolaan sampah di kawasan tersebut?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae, dan bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi yang dilakukan antara kelurahan dengan pihak-pihak tersebut?
3. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan kelurahan bersama mitra dalam pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Pantai Cempae?
4. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak dalam pola kemitraan pengelolaan sampah di kawasan tersebut?

**B. Dinamika dan Kendala**

5. Saja kendala yang dihadapi kelurahan dalam pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan sampah di Tanggul Pantai Cempae, dan bagaimana upaya mengatasinya?
6. Menurut pihak kelurahan, bagaimana dampaknya apabila salah satu pihak dalam kemitraan tidak menjalankan perannya dengan baik?

**C. Hasil dan Evaluasi**

7. Bagaimana hasil atau dampak dari pola kemitraan pengelolaan sampah terhadap kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat di kawasan Tanggul Pantai Cempae?

### Peran & Kerja Sama

1. Apa alasan atau latar belakang keterlibatan TNI ingin berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan Pantai Cempae?
2. Bagaimana bentuk kerja sama yang terjalin antara TNI, DLH, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan pesisir?, dan apakah kegiatan ini berlanjut secara rutin atau kegiatan insendetil saja?
3. Apa saja kegiatan utama yang telah dilakukan TNI bersama pihak lain di kawasan pantai?
4. Menurut Anda, bagaimana dampak kegiatan tersebut terhadap kesadaran masyarakat dan efektivitas kerja sama lintas instansi?

Parepare, 25 November 2025

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

  
Abd. Wahidin, M.Si.

NIP. 19780128 202321 1005

  
Abd. Rasyid, M. Si.

NIP. 19880712 202321 1 024



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

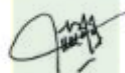
Nama : Mulyani  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Usia : 36 THN  
Alamat : JL. LASINRANG  
Pekerjaan : I.R.T / IBU RT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erina Putri Purnama Amir untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tunggul Pantai Cempae".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 MEI 2026

Yang Bersangkutan

  
MULYANI

  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARHAMDI, S.Si, M.Si  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
 Usia : 46 TAHUN  
 Alamat : JL. PADAT KARM LAPADDE  
 Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erina Putri Purnama Amir untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 / 12 / 2025.

Yang Bersangkutan

  
 ARHAMDI, S.Si, M.Si

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

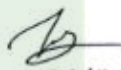
Nama : MUH. TAHIR  
Jenis Kelamin : Laki  
Usia : 44  
Alamat : JL LORONG PERTAMINA  
Pekerjaan : NELAYAN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erina Putri Purnama Amir untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09/05/2022.

Yang Bersangkutan

  
MUH. TAHIR

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mardiah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 37 Tahun  
 Alamat : J. H. Muh. Amin Laengke  
 Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erina Putri Purnama Amir untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tunggul Pantai Cempae".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09/05/2016.

Yang Bersangkutan

*Mardiah*  
 Mardiah

PAREPARE

**Surat Keterangan Wawancara**

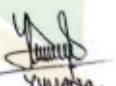
Yang bertanda tangan di bawah ini

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nama          | : YULIANA             |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN           |
| Usia          | : 29 th               |
| Alamat        | : JL. LAKINRANG       |
| Pekerjaan     | : KETUA RT-03 SENTRAL |

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erina Putri Purnama Amir untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan di Tanggul Pantai Cempae".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026  
Yang Bersangkutan

  
YULIANA

  
**PAREPARE**













## semhas ERINA PUTRI PURNAMA AMIR.docx

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <a href="https://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                   | 1896 words — 7%  |
| 2 | <a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                           | 103 words — < 1% |
| 3 | <a href="https://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                   | 75 words — < 1%  |
| 4 | Theofani Eirine Marlissa, I Made Darsana, Kadek Ayu Ekasan. "Model Pengelolaan Sampah sebagai Dampak Massive Tourism yang Berbasis Pentahelix di Desa Wisata Canggu Kabupaten Badung", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026<br>Crossref | 67 words — < 1%  |
| 5 | <a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                               | 36 words — < 1%  |
| 6 | Ernita Dalimunte, Titi Darmi. "Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026<br>Crossref                                                                         | 35 words — < 1%  |
| 7 | <a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                       | 32 words — < 1%  |
| 8 | Destarika Nurrahma Anggraeni, Kariana Ratri, Cintya Nabilla Asrori, Nazwa Naruvia Ananta et al. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Blimbing, Kota Malang", Indonesian Journal of Public Administration Review, 2026<br>Crossref       | 31 words — < 1%  |
| 9 | <a href="https://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                           | 31 words — < 1%  |

## BIODATA P ENULIS



**Erina Putri Purnama Amir** Lahir pada 25 Juli 2002 di Bulukumba.. Anak Pertama. Putri dari pasangan ayah kandung bernama Amiruddin dan Ibu kandung bernama Iddayani Rachmanto. Penulis mulai memasuki pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD 34 Parepare dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Parepare lulus pada tahun 2017. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikanya di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama, akhir penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Kel. Kalosi, Kec. Alla , Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi, penulis mengajukan skripsi dengan judul skripsi “Dinamika Pengelolaan Sampah Pola Kemitraan Di Tanggul Pantai Cempae”